

PERENCANAAN STRATEGIS
(RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018-2023

REVISI



Jl. Laskar Wanita Mentarjo Kompleks Perkatoran Gunung Gare
Telepon/Faxs (0730) 621294
PAGAR ALAM

2021



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam guna menyesuaikan dengan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sebagai upaya mencapai, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rentang waktu 2018 – 2023 agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.


Dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dapat dijelaskan dan disampaikan data dan informasi mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 – 2023 yang akan dicapai. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam merupakan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam serta Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, maka dipandang perlu melakukan revisi Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

Dengan demikian diharapkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2018-2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagar Alam, September 2021

Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam



Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam guna menyesuaikan dengan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sebagai upaya mencapai, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rentang waktu 2018 – 2023 agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dapat dijelaskan dan disampaikan data dan informasi mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 – 2023 yang akan dicapai. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam merupakan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam serta Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, maka dipandang perlu melakukan revisi Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

Dengan demikian diharapkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2018-2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagar Alam, 30 Desember 2021

Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam



Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-1
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.....	II-11
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategi Sekretariat DPRD	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan	III-4
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-4
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-5
BAB IV Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	IV-1
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-1
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam....	V-1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-1
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan	VII-1
BAB VIII Penutup	VIII-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1.a Keadaan PNS Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Menurut Golongan.....	II-7
Tabel 2.2.1.b Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Menurut Status Kepegawaian	II-7
Tabel 2.2.1.c Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Menurut Tingkat Pendidikan	II-8
Tabel 2.2.1.d Keadaan PNS Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Menurut Eselonering	II-8
Tabel 2.2.2.a Aset Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-9
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-13a
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun	II-13b
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	VII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam merupakan perencanaan lima tahunan. Perencanaan Srategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam disusun sebagai wujud komitmen jajaran Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Fungsi Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam pembangunan daerah khususnya pendampingan kegiatan DPRD; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam mendorong peningkatan kualitas kelembagaan DPRD.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam melalui beberapa tahapan :

1. Proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dilakukan dengan fokus group diskusi,



dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.;

2. Menetapkan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.;
3. Menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Bappeda, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kota seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010).

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, maka Renstra Sekretariat DPRD sangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Sekretariat DPRD merupakan penjabaran RPJMD Kota Pagar Alam. Renstra Sekretariat DPRD dipakai dasar penyusunan Renja yang selanjutnya dipertanggungjawabkann dalam LAKIP setiap tahun.

Gambar 1.2
Tata cara Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum Penyusunan:

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang rancangan Pembangunan jangka panjang dan rencana kerja Pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2025;



-
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2013 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018;
 15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 16. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 diubah menjadi nomor 48 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk mengoptimalkan arah kebijakan pokok pembangunan sebagaimana Visi dan Misi serta prioritas program tahunan sesuai dengan profil layanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sehingga setiap penggunaan anggaran tepat guna.
2. Untuk melakukan koreksi perencanaan dan penganggaran sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dipagukan oleh Kepala Daerah

Sebagai dasar atau acuan dalam mengajukan usulan di tahun berikutnya



1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam serta susunan garis besar isi dokumen Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM

Mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM.

Mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Telaahan Visi, Misi, telaahan renstra K/L renstra, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis dan Penentuan isu-isu strategis .

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Mencakup: Tujuan dan sasaran Jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam,

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kerjanya di sajikan dalam Tabel 4.1



BAB V SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mencakup : pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam lima tahun mendatang ;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mencakup : Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 6.1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mencakup : pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam. Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

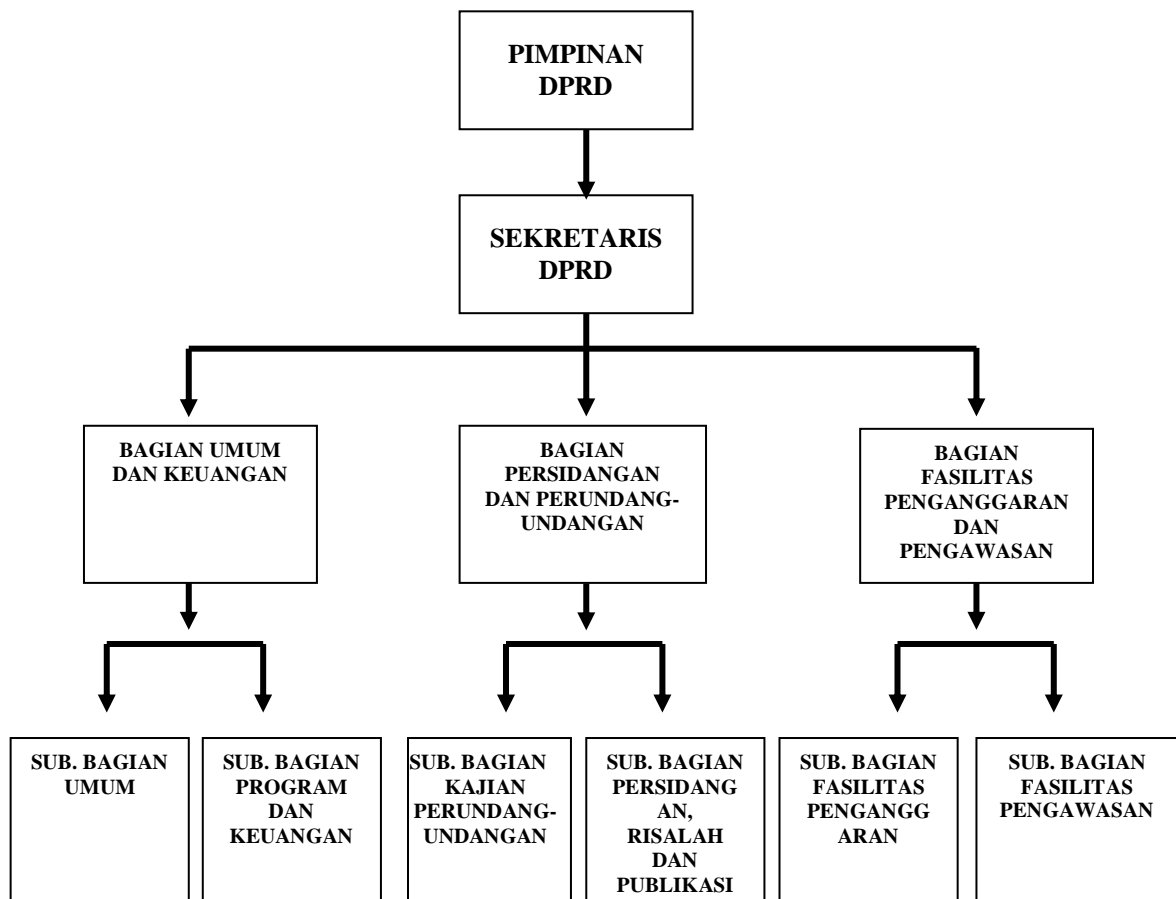
Tugas Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.



Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan
- d. Fasilitasi legislasi, serta penganggaran dan pengawasan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**





Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a) Sekretaris DPRD,
- b) Bagian Umum dan Keuangan,
- c) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, serta
- d) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.

Masing-masing bagian terdiri atas Sub Bagian.

Sekretariat DPRD membawahi Bagian-bagian sebagai berikut :

1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, Administrasi dan sumber daya di bidang Administrasi Kesekretariatan, Program Dan Keuangan DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- i. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;



- k. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- o. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- q. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
dan
- t. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Kepala Bagian Umum Dan Keuangan membawahi dua Sub Bagian yaitu: sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan.

2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian persidangan dan perundang-undangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang legislasi dan Persidangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Persidangan dan perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a) Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b) Memfasilitasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c) Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan Perda inisiatif;
- d) Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan



perundang-undangan;

- e) Mengumpulkan bahan penyiapan draft rancangan Perda Inisiatif;
- f) Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g) Menyusun risalah rapat;
- h) Mengoordinasikan pembahasan rancangan Perda;
- i) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- j) Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k) Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l) Menyelenggarakan publikasi; dan
- m) Menyelenggarakan keprotokolan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi ; Sub. Bagian Kajian Perundang-undangan dan. Sub. Bagian Persidangan, risalah dan publikasi

3. Bagian Fasilitas Penganggaran dan pengawasan

Bagian Pengawasan dan Penganggaran mempunyai tugas memantau Sekretaris Dewan dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penganggaran dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a) Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan APBD / APBD-P;



- c) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan rancangan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- f) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h) Memfasilitasi, mengkoordinasi, dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan membawahi ; Sub Bagian Fasilitas Penganggaran dan Sub Bagian Fasilitas Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainnya.



Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sampai dengan September 2021 berjumlah 39 orang, terdiri dari para pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan yang berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.2.1.a
KEADAAN PNS SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
MENURUT GOLONGAN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. 1	IV/b	2
2	Pembina	IV/a	2
3	Penata Tk 1	III/d	2
4	Penata	III/c	12
5	Penata Muda TK.I	III/b	9
6	Penata Muda	III/a	6
7	Pengatur	II/c	2
8	Pengatur Muda Tk. 1	II/b	2
9	Pengatur Muda	II/a	2
JUMLAH			39

TABEL 2.2.1.b
KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM



MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	39
2	Paket Pemda	-
3	Tenaga Kerja Sukarela	98
JUMLAH		137

TABEL 2.2.1.c
KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	S-2	9
2	Sarjana (S-1)	23
3	Sarjana Muda	1
4	SLTA	5
5	SD	1
JUMLAH		39
Latar Belakang Pegawai Sekretariat DPRD		
1	Sarjana S-2 Managemen	7
2	Sarjana S-2 Magister Administrasi Publik	2
3	Sarjana Teknik	1
4	Sarjana Pertanian	1
5	Sarjana komputer	3
6	Sarjana Ekonomi	17
7	Sarjana Hukum	1
8	Sarjana Muda Komputer	1
9	SLTA	5
10	SD	1
JUMLAH		39

TABEL 2.2.1.d
KEADAAN PNS SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
MENURUT ESELONERING

NO	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	ESELON
1	Sekretaris DPRD	Pembina TK. I (IV/b)	IIB
2	Kabag Umum dan keuangan	Pembina TK. I (IV/b)	IIIA
3	Kabag Persidangan dan perundang-undangan	Pembina (IV/a)	IIIA



Pemerintah Kota Pagar Alam

4	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Pembina (IV/a)	IIIA
5	Kasubbag Umum	Penata (III/c)	IVA
6	Kasubbag Program dan Keuangan	Penata TK. I (III/d)	IVA
7	Kasubbag Kajian Perundang-undangan	Penata (III/c)	IVA
8	Kasubbag Persidangan, Risalah dan Publikasi	Penata (III/c)	IVA
9	Kasubbag Fasilitasi Pengawasan	Penata TK.I (III/d)	IVA
10	Kasubbag Fasilitasi Penganggaran	Penata (III/c)	IVA

2.2.2 Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, asset/ modal yang tercatat pada Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 18.154.503.110,60,- (Delapan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Sepuluh Koma Enam Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.a
Aset Sekretariat DPRD KPA

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 9.259.198.199,60,-
3	Gedung Dan Bangunan	Rp. 7.812.559.911,00,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 965.685.000,00,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 117.060.000,00,-
TOTAL JUMLAH		Rp 18.154.503.110.60



2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serentak diberlakukan di seluruh Indonesia sejak awal tahun 2001. Desentralisasi dan otonomi daerah dipandang sebagai modal daerah menuju masa depan yang lebih baik dengan mendekatkan layanan ke pada masyarakat, sesuai dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu : (1) Kesejahteraan masyarakat, (2) Peningkatan layanan publik, dan (3) Peningkatan daya saing daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat dijadikan jalan untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas dan nyata harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan secara solid baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat entitas yang paling kecil (kelurahan), kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara. Tanggung jawab secara sadar dan teguh melaksanakan setiap tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam RPJMD Kota Pagar Alam yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

Adapun tabel Indikator dan Target Renstra pelayanan Sekretariat DPRD serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2.



2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

Bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatan kebijakan daerah, karena di dalamnya terdiri para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/representasi masyarakat.

Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan rapat-rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjangkaran aspirasi masyarakat, pendalaman tugas anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota DPRD harus dapat terlaksana dengan baik, transparan dan bermanfaat .

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

- 1 Heterogenitas anggota DPRD yang berbeda, dan pergantian keanggotaan DPRD sehingga membutuhkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara optimal
- 2 Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja anggota DPRD
- 3 Banyaknya tuntutan / aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD yang harus diperjuangkan/direalisasikan sedangkan belum semuanya bisa masuk dalam Prioritas.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota DPRD adalah:

- 1 Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat
- 2 Keharmonisan hubungan antara DPRD dengan stakeholders yang lain
- 3 Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi
- 4 Kemudahan Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi agar mampu menyediakan data dan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan referensi rapat-rapat di DPRD



- 5 Pendokumentasian hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
- 6 Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk pendalaman tugas mampu menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SEKWAN/Tahun					Realisasi Capaian /Tahun					Rasio Capaian / Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN PEMERINTAHAN																		
1	Indikator Kerja Kunci (IKK)																		
	Ketersediaan dokumen RKT kelengkapan DPRD	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
	Ketersediaan program pengawasan DPRD	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
	Ketersediaan bahan penetapan Peraturan Daerah	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																		
	Persentase Bahan Penetapan Peraturan Daerah	%		100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	88,8	100	100	100	100	88,8
	Persentase Kebijakan Perencanaan dan Anggaran yang disepakati	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Bahan Peyusunan Rencana Kerja Tahunan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja	41.951.110.870	49.208.762.433	41.740.892.170	45.580.017.913	49.885.228.905	35.198.898.762	39.328.110.513	39.415.163.689	40.529.303.037	47.879.739.175	82	89	96	93	97	0,05	0,08
A	Belanja Tidak Langsung	2.939.214.270	3.374.419.948	3.028.602.528	3.174.722.626	3.338.844.503	2.325.973.755	3.331.508.348	2.988.176.640	3.090.226.308	3.288.311.339	79,14	98,73	98,67	97,34	98,49	0,04	0,11
B	Belanja Langsung	39.011.896.600	45.834.342.485	38.712.289.642	42.405.295.287	46.546.384.402	32.872.925.007	35.996.602.165	36.426.987.049	37.439.076.729	44.591.427.836	84,26	78,54	94,10	88,29	95,80	0,05	0,08



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan pada gambaran layanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam , serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang di perlukan oleh DPRD• Rasionalisasi struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan Anggaran• Dukungan dari Pimpinan• Sumber Daya Manusia• Sarana dan Prasarana
2	Kelembagaan DPRD	Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan APBD Kota	<ul style="list-style-type: none">• Pengetahuan Dasar tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Bagi Aparatur• Penjaringan Aspirasi melalui reses DPRD
		Menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pengetahuan Dasar tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Bagi Aparatur• Pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas Materi - Materi berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan identifikasi permasalahan



yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, antara lain;

1. Anggaran / Dana masih sangat terbatas.
2. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
 - a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mendorong kinerja Lembaga DPRD;
 - b. Secara Kualitas, kemampuan Aparatur yang Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Pelaporan perlu ditingkatkan Sesuai Kompetensi yang dibutuhkan
 - c. Kualitas SDM yang menangani perencanaan perlu ditingkatkan;
 - d. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;
 - e. Belum adanya sistem pengelolaan asset daerah yang baik;

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam

Mencermati Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar 2018-2023 yaitu :

“Mewujudkan Kota Pagar Alam maju dengan konsep kesejahteraan masyarakat dan Keindahan Ekonomi serta Keadilan dalam memperoleh Pendidikan”

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Pagar Alam yang ditetapkan adalah:

1. **Membangun ekonomi yang berkarakter guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.**
2. **Membangun Area Pasar Tradisional berkonsep modern demi terselenggaranya perputaran roda ekonomi yang baik.**
3. **Membangun pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan konsep perawatan lingkungan yang bersih dan sehat.**



4. **Membangun infrastruktur bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan olah raga.**
5. **Membangun karakter Orang Tua dan Anak untuk memahami pentingnya dunia pendidikan.**

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018 - 2023 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 5 (lima) yaitu : “Membangun Karakter Orang Tua dan Anak untuk memahami pentingnya dunia pendidikan ” dengan tujuan yang mengacu kepada Indeks Reformasi Birokrasi yaitu : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel”.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2018 - 2023 Menetapkan tujuan " Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel”.

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dalam Melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi), Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang



berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Mengingat Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam tidak ada hirarki dengan Sekwan Provinsi Sumsel atau Renstra K/L, maka telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan SKPD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam

Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pagar Alam, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 38 Tahun 2016 yang diubah menjadi nomor 48 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terhadap fungsi tugas dan wewenang anggota DPRD yang secara tegas tertuang dalam Peraturan DPRD Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam. Fungsi DPRD yaitu sebagai lembaga legislasi (pembentukan Perda), anggaran dan, pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD antara lain :

- Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- Memilih Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian



- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dandaerah.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari uraian diatas guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya maka peran Sekretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal. Dengan memberikan fasilitasi pelayanan yang prima sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam memperoleh kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan.

Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD hanya ditinjau dari gambaran pelayan SKPD yang merupakan



faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD berdasarkan identifikasi selama pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mengoptimalkan standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
3. Mengoptimalkan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Reses DPRD sebagai aplikasi dari hasil study banding DPRD agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat terlaksana dengan lebih optimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Sekretariat DPRD, yaitu :

- Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
- Rasionalisasi struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya;
- Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya;
- Penjangkaran Aspirasi melalui reses DPRD
- Hasil-hasil Study Banding DPRD



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

4.1.1. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut :“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel”

4.1.2 SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator



sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: “Meningkatnya Kualitas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel”.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam secara lebih ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.1



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel	IRB	-	-	-	-	-
			Persentase bahan Penetapan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Program pengawasan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Bahan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan Fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan Tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan. Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel 5.1.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Serta mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.1

PERMEN 13**FORMULIR DRAFT PERUBAHAN RENSTRA PERIODE 2018-2023**

OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM

[illegible]

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.4.01.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Item	590,128,000	20	843,108,900	20	927,419,790	20	-	-	-	-	-	-	2,360,656,690	60
4.01.4.01.04.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Item	141,651,184	45	228,651,184	45	251,516,302	45	-	-	-	-	-	-	621,818,670	135
4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	item	520,240,000	5	533,320,000	5	586,652,000	5	-	-	-	-	-	-	1,640,212,000	15
4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja makanan dan minuman yang disediakan	item	1,182,400,000	4	1,396,716,000	4	1,536,387,600	4	-	-	-	-	-	-	4,115,503,600	12
4.01.4.01.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	2,911,467,853	81	2,229,418,776	81	2,452,360,654	81	-	-	-	-	-	-	7,593,247,283	243
4.01.4.01.04.01.19	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kerja non PNS yang menerima Upah	Orang	508,500,000	86	579,000,000	86	636,900,000	86	-	-	-	-	-	-	1,724,400,000	258
4.01.4.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	753,896,065	90	617,571,450	90	2,804,357,165	90	-	-	-	-	-	-	4,175,824,679	90
4.01.4.01.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang disediakan	unit	-	0	-	3	2,130,000,000	0	-	-	-	-	-	-	2,130,000,000	3
4.01.4.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Rumah Jabatan	Jumlah rumah/gedung yang layak huni	unit	90,000,000	3	90,000,000	3	90,900,000	3	-	-	-	-	-	-	270,900,000	9
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah rumah/gedung yang layak huni	unit	-	0	200,000,000	1	202,000,000	1	-	-	-	-	-	-	402,000,000	2
4.01.4.01.04.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	unit	837,662,294	24	686,190,500	24	693,052,405	24	-	-	-	-	-	-	2,216,905,199	72
4.01.4.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	543,486,776	100	1,227,300,000	100	1,350,030,000	100	-	-	-	-	-	-	3,120,816,776	100

[illegible]

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.4.01.04.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terselenggaranya Pengembangan Komunikasi , Informasi, dan Media Massa	%	194,347,400	85	99,998,000	85	93,498,130	85	-	-	-	-	-	-	387,843,530	85
4.01.4.01.04.15.08	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah website yang dikelola	website	228,644,000	1	99,998,000	1	109,997,800	1	-	-	-	-	-	-	438,639,800	1
4.01.4.01.04.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Terselenggaranya Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	%	298,803,900	85	365,934,000	85	342,148,290	85	-	-	-	-	-	-	1,006,886,190	85
4.01.4.01.04.18.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah promosi/iklan yang dibayarkan	Item	351,534,000	5	365,934,000	5	402,527,400	5	-	-	-	-	-	-	1,119,995,400	5
TOTAL				32,339,404,490		40,998,393,129		47,365,187,126		-	-	-	-	-	-	-	-
PERMEN 90																	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Capaian Kinerja dan Layanan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	30,774,550,879	90	33,256,823,876	98	38,447,695,570	98	102,485,070,325	98
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	30,015,000	90	40,000,000	100	44,000,000	100	114,015,000	100
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	3	5,500,000	2	15,500,000	6
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA - SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	5,008,000	1	5,000,000	1	5,500,000	1	15,508,000	3

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	4,999,800	1	5,000,000	1	5,500,000	1	15,499,800	3
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	2,500,100	1	5,000,000	1	5,500,000	1	13,000,100	3
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	2,500,100	1	5,000,000	1	5,500,000	1	13,000,100	3
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1	5,500,000	1	15,500,000	3
4.02.01.2.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	5,007,000	1	10,000,000	2	11,000,000	3	26,007,000	6
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	4,101,508,491	90	4,191,453,541	100	4,630,598,895	100	12,923,560,927	100
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	-	-	-	-	-	-	3,554,411,491	40	3,726,336,291	40	4,098,969,920	40	11,379,717,702	120
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	-	-	-	-	-	-	315,960,000	1	321,840,000	1	354,024,000	1	991,824,000	3

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	214,867,340	8	117,807,250	1	129,587,975	1	462,262,565	10
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	16,269,660	1	25,470,000	1	28,017,000	1	69,756,660	3
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	191,722,353	90	178,535,863	100	226,389,449	100	596,647,665	100
4.02.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	191,722,353	1	178,535,863	1	196,389,449	1	566,647,665	3
4.02.01.2.03.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	100	5,000,000	100
4.02.01.2.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.03.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	324,408,000	90	292,358,000	83	308,083,000	83	924,849,000	83
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	-	-	-	139,300,000	3	107,250,000	3	117,975,000	3	364,525,000	9
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	5,000,000	50	5,000,000	50
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	185,108,000	5	185,108,000	5	185,108,000	5	555,324,000	15

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	4,963,723,099	90	3,718,361,548	100	4,215,197,809	100	12,897,282,456	100
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	49,958,238	2	49,998,938	2	49,998,938	2	149,956,114	6
4.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	299,365,950	1	199,292,500	1	219,221,750	1	717,880,200	3
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	298,548,931	2	276,577,760	2	304,235,536	2	879,362,227	6
4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	423,980,700	2	396,000,000	2	435,600,000	2	1,255,580,700	6
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	145,029,280	2	95,247,350	2	104,772,085	2	345,048,715	6
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	-	-	-	-	-	-	600,880,000	1	556,005,000	1	611,605,500	1	1,768,490,500	3
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	3	20,000,000	3
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	12	50,000,000	12
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	3,145,960,000	1	2,145,240,000	1	2,359,764,000	1	7,650,964,000	3
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	2	20,000,000	5	20,000,000	7

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	40,000,000	2	40,000,000	3
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	-	-	-	-	1,031,003,500	90	623,000,000	0	1,955,000,000	100	3,609,003,500	100
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	515,263,000	1	200,000,000	1	750,000,000	1	1,465,263,000	3
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	35,000,000	1	60,000,000	2	95,000,000	3
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	196,350,000	51	198,000,000	25	200,000,000	5	594,350,000	81
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	319,390,500	18	190,000,000	10	300,000,000	5	809,390,500	33
4.02.01.2.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.01.2.07.08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit aset tak berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	25,000,000	1	25,000,000	1
4.02.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	200,000,000	1	200,000,000	1
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	200,000,000	1	200,000,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	200,000,000	1	200,000,000	1
4.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-	-	1,305,600,000	90	1,307,958,000	100	1,450,753,800	100	4,064,311,800	100
4.02.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	-	-	-	-	-	-	12,600,000	1	12,600,000	1	13,860,000	1	39,060,000	3
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	207,000,000	3	209,358,000	3	230,293,800	3	646,651,800	9
4.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	12	12,000,000	12
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	1,086,000,000	107	1,086,000,000	107	1,194,600,000	107	3,366,600,000	321
4.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	-	-	-	-	1,811,365,100	90	1,316,500,900	100	1,680,150,990	100	4,808,016,990	100
4.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	-	-	862,208,100	6	612,206,900	6	673,427,590	6	2,147,842,590	18
4.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	307,700,000	20	306,080,000	20	336,688,000	20	950,468,000	60

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	86,000,000	1	86,000,000	1
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	99,750,000	58	99,920,000	58	109,912,000	58	309,582,000	174
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	12,000,000	4	12,000,000	4
4.02.01.2.09.08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	14,000,000	4	14,000,000	4
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	4	50,000,000	4
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	4	50,000,000	4
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	541,707,000	4	298,294,000	4	328,123,400	4	1,168,124,400	12
4.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	20,000,000	4	20,000,000	4
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	-	-	-	-	-	-	14,970,728,636	90	19,544,179,774	100	21,628,597,751	100	56,143,506,161	100
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	-	-	-	-	-	-	14,692,728,636	25	19,175,179,774	25	21,092,697,751	25	54,960,606,161	75
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	278,000,000	4	369,000,000	4	405,900,000	4	1,052,900,000	12
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check-Up DPRD	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000	26	130,000,000	26
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	-	-	-	-	-	-	2,044,476,700	90	2,044,476,250	100	2,308,923,875	100	6,403,876,825	100

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	10,000,000	1	11,000,000	1
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	50,000,000	1	55,000,000	1
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-	544,476,700	3	544,476,250	3	598,923,875	3	1,687,876,825	9
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000	3	1,500,000,000	3	1,650,000,000	3	4,650,000,000	9
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	-	-	-	-	-	-	26,730,502,110	100	25,401,530,700	100	30,460,542,510	100	82,592,575,320	100
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	-	-	-	-	-	-	4,534,177,050	100	4,403,236,400	100	3,097,430,020	100	12,034,843,470	100
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	1,503,118,200	1	20,000,000	1	1,523,118,200	2
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	3,137,176,950	1	1,503,118,200	1	1,653,430,020	1	6,293,725,170	3
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	15,000,000	1	15,000,000	1
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik yang	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	12,000,000	1	12,000,000	1
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,397,000,100	1	1,397,000,000	1	1,397,000,000	1	4,191,000,100	3


KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	%	-	-	-	-	-	-	7,226,033,400	100	7,203,469,800	100	9,123,816,780	100	23,553,319,980	100
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,432,823,900	1	1,410,259,550	1	1,551,285,505	1	4,394,368,955	3
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,443,322,400	1	1,443,322,200	1	1,587,654,420	1	4,474,299,020	3
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,503,118,100	1	1,503,118,200	1	1,653,430,020	1	4,659,666,320	3
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,433,118,000	1	1,433,118,450	1	1,576,430,295	1	4,442,666,745	3
4.02.02.2.02.05	Pembahasan laporan semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per semester	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,413,651,000	1	1,413,651,400	1	1,555,016,540	1	4,382,318,940	3
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	-	1,419,126,000	100	1,397,126,100	100	1,676,838,710	100	4,493,090,810	100
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.07	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penggunaan anggaran	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,419,126,000	1	1,397,126,100	1	1,536,838,710	1	4,353,090,810	3
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan Kapasitas DPRD	%	-	-	-	-	-	-	2,329,948,660	100	2,073,500,000	100	4,915,838,760	100	9,319,287,420	100
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen									0	-	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1
4.02.02.2.04.02	Bimbingan teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimbingan teknis DPRD	Orang									0	-	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1
4.02.02.2.04.02	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD	dokumen											50,000,000	25	50,000,000	25
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	-	-	-	-	-	-	625,959,900	1	564,700,000	1	621,170,000	1	1,811,829,900	3
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	-	-	-	-	-	-	0	0	118,800,000	3	130,680,000	3	249,480,000	6

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	5,000,000	6	5,000,000	6
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,703,988,760	1	1,390,000,000	1	1,703,988,760	1	4,797,977,520	3
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%	-	-	-	-	-	-	808,935,000	100	534,812,400	100	688,293,640	100	2,032,041,040	100
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	12	50,000,000	12
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	1	50,000,000	1
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	-	-	-	-	-	-	808,935,000	3	534,812,400	3	588,293,640	3	1,932,041,040	9
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan pengawasan	%	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	50,000,000	100	50,000,000	100
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	1	50,000,000	1
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	1	50,000,000	1
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja sama daerah	%	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	10,000,000	100	10,000,000	100
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	dokumen							0	0	-	0	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	5,000,000	1	5,000,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi DPRD	%	-	-	-	-	-	-	10,412,282,000	100	9,789,386,000	100	10,898,324,600	100	31,099,992,600	100
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	10,412,282,000	1	9,789,386,000	1	10,768,324,600	1	30,969,992,600	3
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	50,000,000	1	50,000,000	1
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	30,000,000	1	30,000,000	1
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	1	50,000,000	1
TOTAL				-	-	-	-	-	-	57,505,052,989	-	58,658,354,576	-	68,848,238,080	-	185,017,645,645	-

Pagar Alam, 30 Desember 2021
Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam


Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008



BAB VII

KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Bahan Penetapan Peraturan Daerah	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Program Pengawasan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Bahan Peyusunan Rencana Kerja Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 – 2023.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran DPRD Kota Pagar Alam, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pagar alam, September 2021

Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam



Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008



BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 – 2023.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran DPRD Kota Pagar Alam, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pagar alam, 30 Desember 2021

Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam



Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008

**LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA
RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 TERHADAP
PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**
Nomor :
Tanggal :

HASIL PEMETAAN

PROGRAM/KEGIATAN PADA RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 TERHADAP PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
Jumlah program : 9 program
Jumlah kegiatan : 49 kegiatan

Jumlah program : 3 program
Jumlah kegiatan : 12 kegiatan
Jumlah sub kegiatan : 46 sub kegiatan

Jumlah program : 2 program
Jumlah kegiatan : 15 kegiatan
Jumlah sub kegiatan : 42 sub kegiatan

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
REKAM URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari t-Planning))	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	4.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
							4.02.01.2.03		Administrasi Umum						4.02.01.2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
	4.01.4.01.4.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang dibeli	1880 lbr		4.02.01.2.03.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang dibeli,jasa admin & surat yang dibayarkan	2130 lbr, 3 org		42,744,000	4.02.01.2.08.01				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang dibeli	1260 lembar	12,600,000
	4.01.4.01.4.01.02		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening		4.02.01.2.03.02			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening		180,000,000	4.02.01.2.08.02			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening		207,000,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.03		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah					
	4.01.4.01.4.01.05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah asuransi yang dibayarkan	28 unit		4.02.01.2.03.05			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah asuransi yang dibayarkan	28 unit		163,876,353	4.02.01.2.03.02			Pengamanan barang milik daerah SKPD	Frekuensi asuransi yang dibayarkan	1 kali/th		163,876,353
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
															4.02.01.2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah					
	4.01.4.01.4.01.03		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	24 unit		4.02.01.2.03.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	24 unit		44,750,000	4.02.01.2.09.01				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan	5 unit	22,500,000
															4.02.01.2.09.02			Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan	19 unit		23,450,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning))	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
															4.02.01.2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
	4.01.4.01.4.01.60		Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis	Jumlah orang penerima upah	75 orang		4.02.01.2.03.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang dibayarkan	90 orang	954,000,000		4.02.01.2.08.04				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Frekuensi upah yang dibayarkan	12 bulan	1,086,000,000		
	4.01.4.01.4.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah yang dibayarkan	8 orang		4.02.01.2.03.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah yang dibayarkan	8 orang	288,000,000		4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
															4.02.01.2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah						
	4.01.4.01.4.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis		4.02.01.2.03.09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis	88,650,000		4.02.01.2.09.06				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis	85,370,000		
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
															4.02.01.2.06			Administrasi umum perangkat daerah						
	4.01.4.01.4.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang siap pakai	63 item		4.02.01.2.03.10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang siap pakai	63 item	199,993,200											
	4.01.4.01.4.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60 item		4.02.01.2.03.13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60 item	297,369,600		4.02.01.2.06.02				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	58 item	199,324,950		
	4.01.4.01.4.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	24 item		4.02.01.2.03.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	24 item	183,999,750		4.02.01.2.06.05				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	15 item	95,359,110		
	4.01.4.01.4.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	3 item		4.02.01.2.03.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	3 item	49,995,279		4.02.01.2.06.01				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	14 item	49,958,238		
	4.01.4.01.4.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	45 item		4.02.01.2.03.14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	45 item	276,594,581		4.02.01.2.06.03				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	44 item	276,589,555		
	4.01.4.01.4.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	48 jenis		4.02.01.2.03.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	48 jenis	264,000,000		4.02.01.2.06.06				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	4 item	600,480,000		
	4.01.4.01.4.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak		4.02.01.2.03.17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak	395,955,000		4.02.01.2.06.04				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan dan minum yang dibeli	13290 kotak	395,983,500		
	4.01.4.01.4.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	41 orang		4.02.01.2.03.18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	41 orang	1,856,127,000		4.02.01.2.06.09				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi pegawai yang melakukan perjalanan dinas	12 bulan	1,948,960,000		
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
	4.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													4.02.01.2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah						

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari i-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
	4.01.4.01.4.02.20		Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang layak huni	3 rumah		4.02.01.2.03.26				Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang layak huni	3 rumah	299,880,000	4.02.01.2.09.11				Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rumah/gedung yang layak huni	3 rumah, 1gedung kantor	350,300,000		
	4.01.4.01.4.02.22		Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak huni	1 gedung		4.02.01.2.03.28				Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak huni	1 gedung	199,906,000										
4.01.4.01.4.02.24			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	24 unit		4.02.01.2.03.30				Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	24 unit	762,351,600	4.02.01.2.09.01				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan yang dibayarkan	5 unit	437,010,000		
															4.02.01.2.09.02				Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perorangan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan yang dibayarkan	19 unit	284,250,000		
															4.02.01.2.09.09				Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor /bangunan lainnya	4 unit	-		
															4.02.01.2.09.10				Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	4 unit	-		
4.01.03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																						
							4.02.01.2.04			Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur														
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
															4.02.01.2.05			Administrasi kepegawain perangkat daerah						
4.01.4.01.4.03.02			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	175 stel		4.02.01.2.04.02				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	3stel	8,000,000	4.2.01.2.05.02				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	165 stel	57,750,000		
4.01.4.01.4.03.05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan batik yang dibeli	235 stel		4.02.01.2.04.05				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan batik yang dibeli	235 stel	91,350,000										
4.01.05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR													4.2.01.2.05.10				Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	socialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 kali	-		
4.01.4.01.4.05.03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	0		4.02.01.2.04.11				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	4 orang	199,562,000	4.2.01.2.05.11				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek/asdeski	1 orang	185,108,000		
4.01.4.01.4.05.35			Mengikuti rapat-rapat kerja nasional Asosiasi Sekretariat DPRD seluruh Indonesia (ASDEKSI)	Jumlah peserta yang mengikuti ASDEKSI	4 orang																			
	4.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																						

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
							4.02.01.2.01			Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah														
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
															4.02.01.2.01			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
	4.01.4.06.16		Penyusunan Renja	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.01			Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		10,000,000	4.02.01.2.01.01			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen		5,000,000		
	4.01.4.01.4.06.22		Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.02			Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		35,000,000	4.02.01.2.01.02			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		5,008,000		
															4.02.01.2.01.03			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		4,999,800		
															4.02.01.2.01.04			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		2,500,100		
															4.02.01.2.01.05			Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		2,500,100		
	4.01.4.01.4.06.24		Penyusunan TAPKIN	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen																			
	4.01.4.01.4.06.26		Penyusunan LPPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.03			Penyusunan dokumentasi evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		20,000,000	4.02.01.2.01.07			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		5,007,000		
							4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
							4.02.01.2.02			Administrasi Keuangan					4.02.01.2.02			Administrasi keuangan perangkat daerah						
							4.02.01.2.02.01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (Gaji 13, dan 14),terbayarnya beban kerja (BK)	14 bulan, 12 bulan		3,658,693,990	4.02.01.2.02.01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (Gaji 13, dan 14),terbayarnya beban kerja (BK)	14 bulan, 12 bulan		3,667,054,927		
	4.01.4.01.4.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang dibayarkan	19 orang		4.02.01.2.02.02			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah orang yang menerima honor	18 orang		365,040,000	4.02.01.2.02.02			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Frekuensi pegawai yang menerima honorarium	9 bulan		223,290,000		
	4.01.4.01.4.06.04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.09			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		24,269,900	4.2.1.2.02.5			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		16,269,660		
	4.01.4.01.4.06.25		Penyusunan rekapitulasi realisasi SPP dan SPM	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen										4.2.1.2.02.3			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen		80,000,250		
	4.01.4.01.4.06.40		Penatausahaan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.04			Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen		87,999,960										
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari I-Planning)	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
															4.02.01.2.01			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
	4.01.4.01.4.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.06			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		5,000,000	4.02.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	5,000,000		
	4.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																						
							4.02.02		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
							4.02.02.2.01		Layanan administrasi DPRD						4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD							
	4.01.4.01.4.15.03		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah makan minum yang tersedia	2500 kotak		4.02.02.2.01.02			Fasilitas rapat DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	11 rapat		773,398,960	4.02.01.2.16.03				Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	11 rapat	544,476,700		
							4.02.01.2.03.17		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi umum	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak	1,140,000,000	4.02.01.2.16.04				Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga DPRD yang tersedia	3 pimpinan	1,500,000,000		
															4.02.01.2.16.01				Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	administrasi keanggotaan DPRD yang diselenggarakan	25 anggota	-		
															4.02.01.2.16.02				Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang difasilitasi	7 fraksi	-		
															4.02.01.2.14			Pelaksanaan protokol dan komunikasi Pimpinan						
															4.02.01.2.14.01				Fasilitas keprotokolan yang difasilitasi	Jumlah keprotokolan yang difasilitasi	3 kegiatan	0		
															4.02.01.2.14.02				Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	Jumlah komunikasi pimpinan yang difasilitasi	10 kegiatan	-		
															4.02.01.2.14.03				Pendokumentasian tugas pimpinan	tugas pimpinan yang didokumentasikan	12 kegiatan	-		
	4.01.4.01.4.15.04		Rapat-rapat paripurna	jenis rapat yang dilaksanakan	3 jenis																			
	4.01.4.01.4.15.24		Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW)	Jumlah orang yang dilantik																				
							4.02.02		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
							4.02.02.2.01		Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD						4.02.01.2.15		Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD							
							4.02.02.2.01.01			Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan tunjangan DPRD	25 orang		15,347,179,778	4.02.01.2.15.01				Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah penerima Gaji dan tunjangan DPRD	25 orang	15,347,179,774		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
							4.02.02.2.01.03				Pelaksanaan medical cek up DPRD	Frekuensi medical check up yang dilaksanakan	1 kali		4.02.01.2.15.03				Pelaksanaan medical cek up DPRD	Frekuensi medical check up yang dilaksanakan	1 kali		0	
	4.01.4.01.4.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	175 stel		4.02.01.2.04.02		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	185 stel	200,000,000	4.02.01.2.15.02				Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	78 stel		208,000,000	
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
															4.02.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					-	
															4.02.01.2.07.01				Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit		-	
															4.02.01.2.07.02				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	5 unit mtr		-	
															4.02.01.2.07.05				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10 unit		-	
															4.02.01.2.07.06				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	12 unit		-	
															4.02.01.2.07.09				Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit		-	
															4.02.01.2.07.10				Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 item		-	
															4.02.01.2.07.11				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 item		-	
							4.02.03		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
							4.02.03.2.02			Pembahasan kebijakan anggaran					4.02.02.2.02			Pembahasan kebijakan anggaran						
	4.01.4.01.4.15.23		Konsultasi pembahasan dan paripurna KUA PPAS APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.01			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,408,649,100		4.02.02.2.02.01				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,432,823,900	
	4.01.4.01.4.15.27		Pembahasan RAPBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.03			Pembahasan APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-		4.02.02.2.02.03				Pembahasan APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-	
	4.01.4.01.4.15.29		Konsultasi, pembahasan dan paripurna KUPA PPAP	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.02			Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,407,866,750		4.02.02.2.02.02				Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,443,322,400	
	4.01.4.01.4.15.42		Pembahasan RAPBD Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.04			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,326,536,000		4.02.02.2.02.04				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,433,118,000	
	4.02.4.01.4.17.04		Pembahasan LKPI Walikota Pagar Alam	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen																			
	4.02.4.01.4.17.06		Pembahasan rancangan daerah laporan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.06			Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen	1,407,470,000		4.02.02.2.02.06				Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,413,651,000	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	
															4.02.02.2.02.05					Pembahasan laporan semester	jumlah laporan yang dibahas	1 dokumen	-
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
															4.02.02.2.03				Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan				
	4.02.4.01.4.17.04		Pembahasan LKPI Walikota Pagar Alam	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.06			Pembahasan pertanggungjawaban APBD	jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen	1,555,998,400		4.02.02.2.03.08				Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,419,126,000	
															4.02.02.2.03.01				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
															4.02.02.2.03.02				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
															4.02.02.2.03.03				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
															4.02.02.2.03.04				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
															4.02.02.2.03.05				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
															4.02.02.2.03.06				Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
															4.02.02.2.03.07				Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
							4.02.03		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
							4.02.03.2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD					4.02.02.2.04				Peningkatan kapasitas DPRD				
	2.10.4.01.4.15.03		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	jumlah website yang di upgrade	1 website		4.02.03.2.04.03			Publikasi dan dokumentasi dewan	jumlah website yang diupgrade dan jenis dokumentasi,	1 website dan 3 jenis iklan	254,400,000		4.02.02.2.04.03				Publikasi dan dokumentasi dewan	jenis dokumentasi publikasi yang dilaksanakan	1 website dan 4 jenis iklan	264,000,000	
	2.10.4.01.4.18.01		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jenis dokumentasi dan publikasi yang dilaksanakan	3 jenis iklan																		
	4.01.4.01.4.15.07		Penyediaan jasa advokasi	jumlah tenaga ahli hukum	2 orang		4.02.03.2.04.04			Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	jumlah tenaga ahli yang tersedia	2 orang	99,600,000		4.02.02.2.04.04				Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	jumlah tenaga ahli yang tersedia	2 orang	-	
	4.01.4.01.4.15.16		Penyusunan dan pembahasan rencana kerja DPRD kota Pagar	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.04.07			Penyusunan program kerja DPRD	jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1,338,067,970		4.02.02.2.04.07				Penyusunan program kerja DPRD	jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1,703,989,060	
															4.02.02.2.04.01				Orientasi DPRD	orientasi DPRD yang dilaksanakan	1 kali	-	
															4.02.02.2.04.02				Bimbingan teknis DPRD	bimtek DPRD yang dilaksanakan	1 kali	-	
															4.02.02.2.04.05				Penyediaan tenaga ahli fraksi	tenaga ahli fraksi yang disediakan	5 org	-	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
															4.02.02.2.04.06				Penyelenggaraan hubungan masyarakat	frekuensi hubungan masyarakat yang diselenggarakan	3 kali	-
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.05			Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat					4.02.02.2.05			Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat				
															4.02.02.2.05.01				Kunjungan kerja dalam daerah	frekuensi kunjungan kerja yang dilaksanakan	3 kali	-
															4.02.02.2.05.02				Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
	4.01.4.01.4.15.37		Kegiatan Reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali		4.02.03.2.05.03			Pelaksanaan reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali		342,488,000	4.02.02.2.05.03				Pelaksanaan reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali	534,812,000
	4.02.17	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIYAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN																				
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.01			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					4.02.02.2.01				Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD			
							4.02.03.2.01.01			Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		634,695,490	4.02.02.2.01.01				Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	0
	4.01.4.01.4.15.01		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.01.02			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,695,497,000	4.02.02.2.01.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,448,587,900
	4.02.4.01.4.17.05		Pembahasan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.01.05			Penyusunan tata tertib DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-	4.02.02.2.01.05				Penyusunan tata tertib DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.01.03				Penyelenggaraan kajian perundang-undangan yang dikaji	jumlah perundang-undangan yang dikaji	3 bahan	-
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.06			Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD					4.02.02.2.06				Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD			
							4.02.03.2.06.01			Penyusunan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-	4.02.02.2.06.01				Penyusunan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.06.02				Pengawasan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.07				Pembahasan kerja sama daerah			
															4.02.02.2.07.01				Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning))	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	
															4.02.02.2.07.02				Penyusunan bahan komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
							4.02.03.2.08			Fasilitasi tugas pimpinan DPRD					4.02.02.2.08			Fasilitasi Tugas DPRD					
	4.01.4.01.4.15.06		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang		4.02.03.2.08.01			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang		8,946,344,000	4.02.02.2.08.01			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang		9,748,074,000	
															4.02.02.2.08.02			Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen		0	
															4.02.02.2.08.03			Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah tugas yang difasilitasi	3 kali		0	
															4.02.02.2.08.04			Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah tugas yang difasilitasi	3 kali		0	
JUMLAH						-	JUMLAH							48,931,299,661									48,939,660,277

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


KETUA TAPD,
Drs. Samsul Bahri Burlian, M.Si
NIP. 196607121986031001

ANGGOTA TAPD :
KEPALA BAPPEDA,
Novi Apriyadi, SE.MM
NIP. 197711052003121004

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,
Iwan Mieke Wijaya, ST.MM
NIP. 197611102003121005

KABAG. ADM. PEMBANGUNAN,
Budiarjo Sahar, S.Pd.MM
NIP. 197004151998021004

Pagar Alam, 2020
Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam


Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008

LAMPIRAN

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA
RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 TERHADAP
PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019
Nomor :
Tanggal :

HASIL PEMETAAN
PROGRAM/KEGIATAN PADA RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 TERHADAP PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
Jumlah program : 9 program
Jumlah kegiatan :49 kegiatan

Jumlah program : 3 program
Jumlah kegiatan : 12 kegiatan
Jumlah sub kegiatan : 46 sub kegiatan

Jumlah program : 2 program
Jumlah kegiatan : 15 kegiatan
Jumlah sub kegiatan : 42 sub kegiatan

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari I-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	4.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
							4.02.01.2.03			Administrasi Umum					4.02.01.2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
	4.01.4.01.4.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibeli	1880 lbr		4.02.01.2.03.01				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibeli,jasa admin E surat yang dibayarkan	2130 lbr, 3 org	42,744,000	4.02.01.2.08.01				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibeli	1260 lembar	12,600,000
	4.01.4.01.4.01.02		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening		4.02.01.2.03.02				Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening	180,000,000	4.02.01.2.08.02				Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening	207,000,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.03			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				
	4.01.4.01.4.01.05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah asuransi yang dibayarkan	28 unit		4.02.01.2.03.05				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah asuransi yang dibayarkan	28 unit	163,876,353	4.02.01.2.03.02				Pengamanan barang milik daerah SKPD	Frekuensi asuransi yang dibayarkan	1 kali/th	163,876,353
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
															4.02.01.2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
															4.02.01.2.09.01				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan	5 unit	22,500,000
	4.01.4.01.4.01.03		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah pajak kendaraan yang	24 unit		4.02.01.2.03.06				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah pajak kendaraan yang	24 unit	44,750,000								

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
			penerimaan kendaraan dinas/operasional	dibayarkan							kendaraan dinas/operasional	dibayarkan			4.02.01.2.09.02				Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan	19 unit	23,450,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
	4.01.4.01.4.01.60		Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis	Jumlah orang penerima upah	75 orang		4.02.01.2.03.07				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang dibayarkan	90 orang	954,000,000	4.02.01.2.08.04				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Frekuensi upah yang dibayarkan	12 bulan	1,086,000,000
	4.01.4.01.4.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah yang dibayarkan	8 orang		4.02.01.2.03.08				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah yang dibayarkan	8 orang	288,000,000								
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Dserah				
	4.01.4.01.4.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis		4.02.01.2.03.09				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis	88,650,000	4.02.01.2.09.06				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis	85,370,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.06			Administrasi umum perangkat daerah				
	4.01.4.01.4.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang siap pakai	63 item		4.02.01.2.03.10				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang siap pakai	63 item	199,993,200	4.02.01.2.06.02				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	58 item	199,324,950
	4.01.4.01.4.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60 item		4.02.01.2.03.13				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60 item	297,369,600								
	4.01.4.01.4.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	24 item		4.02.01.2.03.11				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	24 item	183,999,750	4.02.01.2.06.05				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	15 item	95,359,110
	4.01.4.01.4.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	3 item		4.02.01.2.03.12				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	3 item	49,995,279	4.02.01.2.06.01				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	14 item	49,958,238
	4.01.4.01.4.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	45 item		4.02.01.2.03.14				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	45 item	276,594,581	4.02.01.2.06.03				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	44 item	276,589,555

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	4.01.4.01.4.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	48 jenis		4.02.01.2.03.15				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	48 jenis	264,000,000	4.02.01.2.06.06				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	4 item	600,480,000
	4.01.4.01.4.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak		4.02.01.2.03.17				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak	395,955,000	4.02.01.2.06.04				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan dan minum yang dibeli	13290 kotak	395,983,500
	4.01.4.01.4.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	41 orang		4.02.01.2.03.18				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	41 orang	1,856,127,000	4.02.01.2.06.09				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi pegawai yang melakukan perjalanan dinas	12 bulan	1,948,960,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
	4.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													4.02.01.2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
	4.01.4.01.4.02.20		Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang layak huni	3 rumjab		4.02.01.2.03.26				Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang layak huni	3 rumjab	299,880,000	4.02.01.2.09.11				Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rumah/gedung yang layak huni	3 rumjab, 1gedung kantor	350,300,000
	4.01.4.01.4.02.22		Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak huni	1 gedung		4.02.01.2.03.28				Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak huni	1 gedung	199,906,000								
	4.01.4.01.4.02.24		Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	24 unit		4.02.01.2.03.30				Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	24 unit	762,351,600	4.02.01.2.09.01				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan yang dibayarkan	5 unit	437,010,000
															4.02.01.2.09.02				Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan yang dibayarkan	19 unit	284,250,000
															4.02.01.2.09.09				Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor /bangunan lainnya	4 unit	-
															4.02.01.2.09.10				Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	4 unit	-
	4.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																				

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
							4.02.01.2.04			Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur												
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.05			Administrasi kepegawaian perangkat daerah				
	4.01.4.01.4.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	175 stel		4.02.01.2.04.02			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	3stel	8,000,000									
	4.01.4.01.4.03.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan batik yang dibeli	235 stel		4.02.01.2.04.05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan batik yang dibeli	235 stel	91,350,000		4.2.01.2.05.02			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian yang dibeli	165 stel	57,750,000
	4.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR													4.2.01.2.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 kali	-
	4.01.4.01.4.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	0		4.02.01.2.04.11			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	4 orang	199,562,000		4.2.01.2.05.11			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek/asdeksi	1 orang	185,108,000
	4.01.4.01.4.05.35		Mengikuti rapat-rapat kerja nasional Asosiasi Sekretariat DPRD seluruh Indonesia (ASDEKSI)	Jumlah peserta yang mengikuti ASDEKSI	4 orang																	
	4.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																				
							4.02.01.2.01			Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah												
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.01			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
	4.01.4.06.16		Penyusunan Renja	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.01			Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	10,000,000		4.02.01.2.01.01			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	5,000,000
	4.01.4.01.4.06.22		Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.02			Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	35,000,000		4.02.01.2.01.02			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	5,008,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
															4.02.01.2.01.03				Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	4,999,800
															4.02.01.2.01.04				Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	2,500,100
															4.02.01.2.01.05				Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	2,500,100
	4.01.4.01.4.06.24		Penyusunan TAPKIN	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen																	
	4.01.4.01.4.06.26		Penyusunan LPPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.03				Penyusunan dokumentasi evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	20,000,000	4.02.01.2.01.07				Evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	5,007,000
							4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
							4.02.01.2.02			Administrasi Keuangan					4.02.01.2.02			Administrasi keuangan perangkat daerah				
							4.02.01.2.02.01				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (Gaji 13, dan 14),terbayarnya beban kerja (BK)	14 bulan, 12 bulan	3,658,693,990	4.02.01.2.02.01				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (Gaji 13, dan 14),terbayarnya beban kerja (BK)	14 bulan, 12 bulan	3,667,054,927
	4.01.4.01.4.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang dibayarkan	19 orang		4.02.01.2.02.02				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah orang yang menerima honor	18 orang	365,040,000	4.02.01.2.02.02				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Frekuensi pegawai yang menerima honorarium	9 bulan	223,290,000
	4.01.4.01.4.06.04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.09				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	24,269,900	4.2.1.2.02.5				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	16,269,660
	4.01.4.01.4.06.25		Penyusunan rekapitulasi realisasi SPP dan SPM	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen										4.2.1.2.02.3				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen	80,000,250
	4.01.4.01.4.06.40		Penatausahaan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.04				Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen	87,999,960								
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.01			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
	4.01.4.01.4.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.06				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	5,000,000	4.02.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	5,000,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	4.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																				
							4.02.02		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
							4.02.02.2.01			Layanan administrasi DPRD					4.02.01.2.16			Layanan Administrasi DPRD				
	4.01.4.01.4.15.03		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah makan minum yang tersedia	2500 kotak		4.02.02.2.01.02				Fasilitasi rapat DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	11 rapat	773,398,960	4.02.01.2.16.03				Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	11 rapat	544,476,700
							4.02.01.2.03.17		Program penunjang urusan pemerintaandae rah	Administrasi umum	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak	1,140,000,000	4.02.01.2.16.04				Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga DPRD yang tersedia	3 pimpinan	1,500,000,000
															4.02.01.2.16.01				Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	administrasi keanggotaan DPRD yang diselenggarakan	25 anggota	-
															4.02.01.2.16.02				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang difasilitasi	7 fraksi	-
															4.02.01.2.14			Pelaksanaan protokol dan komunikasi Pimpinan				
															4.02.01.2.14.01				Fasilitasi keprotokolan yang difasilitasi	Jumlah keprotokolan yang difasilitasi	3 kegiatan	0
															4.02.01.2.14.02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah komunikasi pimpinan yang difasilitasi	10 kegiatan	-
															4.02.01.2.14.03				Pendokumentasian tugas pimpinan	tugas pimpinan yang didokumentasikan	12 kegiatan	-
	4.01.4.01.4.15.04		Rapat-rapat paripurna	jenis rapat yang dilaksanakan	3 jenis																	
	4.01.4.01.4.15.24		Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW)	Jumlah orang yang dilantik																		
							4.02.02		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
							4.02.02.2.01			Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD					4.02.01.2.15			Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD				
							4.02.02.2.01.01				Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan tunjangan DPRD	25 orang	15,347,179,778	4.02.01.2.15.01				Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah penerima Gaji dan tunjangan DPRD	25 orang	15,347,179,774

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
							4.02.02.2.01.03				Pelaksanaan medical ceck up DPRD	Frekuensi medical check up yang dilaksanakan	1 kali	0	4.02.01.2.15.03				Pelaksanaan medical ceck up DPRD	Frekuensi medical check up yang dilaksanakan	1 kali	0
	4.01.4.01.4.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	175 stel		4.02.01.2.04.02		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	185 stel	200,000,000	4.02.01.2.15.02				Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	78 stel	208,000,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				-
															4.02.01.2.07.01				Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	-
															4.02.01.2.07.02				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	5 unit mtr	-
															4.02.01.2.07.05				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang disediakan	10 unit	-
															4.02.01.2.07.06				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	12 unit	-
															4.02.01.2.07.09				Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-
															4.02.01.2.07.10				Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 item	-
															4.02.01.2.07.11				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 item	-
							4.02.03		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.02			Pembahasan kebijakan anggaran					4.02.02.2.02			Pembahasan kebijakan anggaran				
	4.01.4.01.4.15.23		Konsultasi pembahasan dan paripurna KUA PPAS APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.01				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,408,649,100	4.02.02.2.02.01				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,432,823,900
	4.01.4.01.4.15.27		Pembahasan RAPBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.03				Pembahasan APBD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	4.02.02.2.02.03				Pembahasan APBD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	4.01.4.01.4.15.29		Konsultasi, pembahasan dan paripurna KUPA PPAP	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.02				Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,407,866,750	4.02.02.2.02.02				Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,443,322,400
	4.01.4.01.4.15.42		Pembahasan RAPBD Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.04				Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,326,536,000	4.02.02.2.02.04				Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,433,118,000
	4.02.4.01.4.17.04		Pembahasan LKPJ Walikota Pagar Alam	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.06				Pembahasan pertanggungjawabana APBD	jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen	1,407,470,000	4.02.02.2.02.06				Pembahasan pertanggungjawaban APBD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,413,651,000
	4.02.4.01.4.17.06		Pembahasan rancangan daerah laporan pertanggungjawaban	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen																	
															4.02.02.2.02.05				Pembahasan laporan semester	jumlah laporan yang dibahas	1 dokumen	-
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
															4.02.02.2.03			Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan				
	4.02.4.01.4.17.04		Pembahasan LKPJ Walikota Pagar Alam	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.06				Pembahasan pertanggungjawabana APBD	jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen	1,555,998,400	4.02.02.2.03.08				Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,419,126,000
															4.02.02.2.03.01				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.03.02				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.03.03				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.03.04				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.03.05				Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.03.06				Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.03.07				Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari I-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
							4.02.03		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD					4.02.02.2.04			Peningkatan kapasitas DPRD				
	2.10.4.01.4.15.03		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah website yang di upgrade	1 website		4.02.03.2.04.03				Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah website yang diupgrade dan jenis dokumentasi,	1 website dan 3 jenis iklan	254,400,000	4.02.02.2.04.03				Publikasi dan dokumentasi dewan	jenis dokumentasi publikasi yang dilaksanakan	1 website dan 4 jenis iklan	264,000,000
	2.10.4.01.4.18.01		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jenis dokumentasi dan publikasi yang dilaksanakan	3 jenis iklan																	
	4.01.4.01.4.15.07		Penyediaan jasa advokasi	Jumlah tenaga ahli hukum	2 orang		4.02.03.2.04.04				Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah tenaga ahli yang tersedia	2 orang	99,600,000	4.02.02.2.04.04				Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah tenaga ahli yang tersedia	2 orang	-
	4.01.4.01.4.15.16		Penyusunan dan pembahasan rencana kerja DPRD kota Pagar	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.04.07				Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1,338,067,970	4.02.02.2.04.07				Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	1,703,989,060
															4.02.02.2.04.01				Orientasi DPRD	orientasi DPRD yang dilaksanakan	1 kali	-
															4.02.02.2.04.02				Bimbingan teknis DPRD	bimtek DPRD yang dilaksanakan	1 kali	-
															4.02.02.2.04.05				Penyediaan tenaga ahli fraksi	tenaga ahli fraksi yang disediakan	5 org	-
															4.02.02.2.04.06				Penyelenggaraan hubungan masyarakat	frekuensi hubungan masyarakat yang diselenggarakan	3 kali	-
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.05			Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat					4.02.02.2.05			Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat				
															4.02.02.2.05.01				Kunjungan kerja dalam daerah	Frekuensi kunjungan kerja yang dilaksanakan	3 kali	-
															4.02.02.2.05.02				Penyusunan pokok- pokok pikiran DPRD	Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
	4.01.4.01.4.15.37		Kegiatan Reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali		4.02.03.2.05.03				Pelaksanaan reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali	342,488,000	4.02.02.2.05.03				Pelaksanaan reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali	534,812,000
	4.02.17	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN																				
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.01			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					4.02.02.2.01			Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD				

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari I-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
							4.02.03.2.01.01				Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	634,695,490	4.02.02.2.01.01				Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	0
	4.01.4.01.4.15.01		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.01.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,695,497,000	4.02.02.2.01.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,448,587,900
	4.02.4.01.4.17.05		Pembahasan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.01.05				Penyusunan tata tertib DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	4.02.02.2.01.05				Penyusunan tata tertib DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.01.03				Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah perundang-undangan yang dikaji	3 bahan	-
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.06				Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD				4.02.02.2.06				Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD			
							4.02.03.2.06.01				Penyusunan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	4.02.02.2.06.01				Penyusunan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.06.02				Pengawasan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.07				Pembahasan kerja sama daerah			
															4.02.02.2.07.01				Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.07.02				Penyusunan bahan komunikasi dan Publikasi	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.08				Fasilitasi tugas pimpinan DPRD				4.02.02.2.08				Fasilitasi Tugas DPRD			
	4.01.4.01.4.15.06		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang		4.02.03.2.08.01				Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang	8,946,344,000	4.02.02.2.08.01				Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang	9,748,074,000
															4.02.02.2.08.02				Penyusunan laporan kinerja DPRD	jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	0
															4.02.02.2.08.03				Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	jumlah tugas yang difasilitasi	3 kali	0
															4.02.02.2.08.04				Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	jumlah tugas yang difasilitasi	3 kali	0

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
JUMLAH						-	JUMLAH							48,931,299,661								48,939,660,277

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KETUA TAPD,
Drs. Samsul Bahri Burlian, M.Si
NIP. 196607121986031001

.....

ANGGOTA TAPD :

KEPALA BAPPEDA,
Novi Apriyadi, SE.MM
NIP. 197711052003121004

.....

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

Iwan Mieke Wijaya, ST.MM
NIP. 197611102003121005

.....

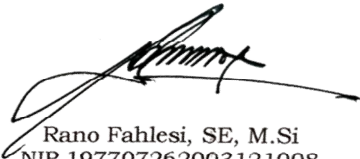
KABAG. ADM. PEMBANGUNAN,

Budiarjo Sahar, S.Pd.MM
NIP. 197004151998021004

.....

Pagar Alam,2020

Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam



Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008

PERENCANAAN STRATEGIS
(RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018-2023

REVISI



Jl. Laskar Wanita Mentarjo Kompleks Perkatoran Gunung Gare
Telepon/Faxs (0730) 621294
PAGAR ALAM

2021



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam guna menyesuaikan dengan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sebagai upaya mencapai, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rentang waktu 2018 – 2023 agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dapat dijelaskan dan disampaikan data dan informasi mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 – 2023 yang akan dicapai. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam merupakan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam serta Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, maka dipandang perlu melakukan revisi Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

Dengan demikian diharapkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2018-2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagar Alam, 30 Desember 2021

Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam



Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-1
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.....	II-11
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategi Sekretariat DPRD	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan	III-4
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-4
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-5
BAB IV Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	IV-1
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-1
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam....	V-1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-1
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan	VII-1
BAB VIII Penutup	VIII-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1.a Keadaan PNS Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Menurut Golongan.....	II-7
Tabel 2.2.1.b Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Menurut Status Kepegawaian	II-7
Tabel 2.2.1.c Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Menurut Tingkat Pendidikan	II-8
Tabel 2.2.1.d Keadaan PNS Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Menurut Eselonering	II-8
Tabel 2.2.2.a Aset Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-9
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	II-13a
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun	II-13b
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	VII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam merupakan perencanaan lima tahunan. Perencanaan Srategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam disusun sebagai wujud komitmen jajaran Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Fungsi Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam pembangunan daerah khususnya pendampingan kegiatan DPRD; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam mendorong peningkatan kualitas kelembagaan DPRD.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam melalui beberapa tahapan :

1. Proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dilakukan dengan fokus group diskusi,



dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.;

2. Menetapkan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.;
3. Menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Bappeda, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

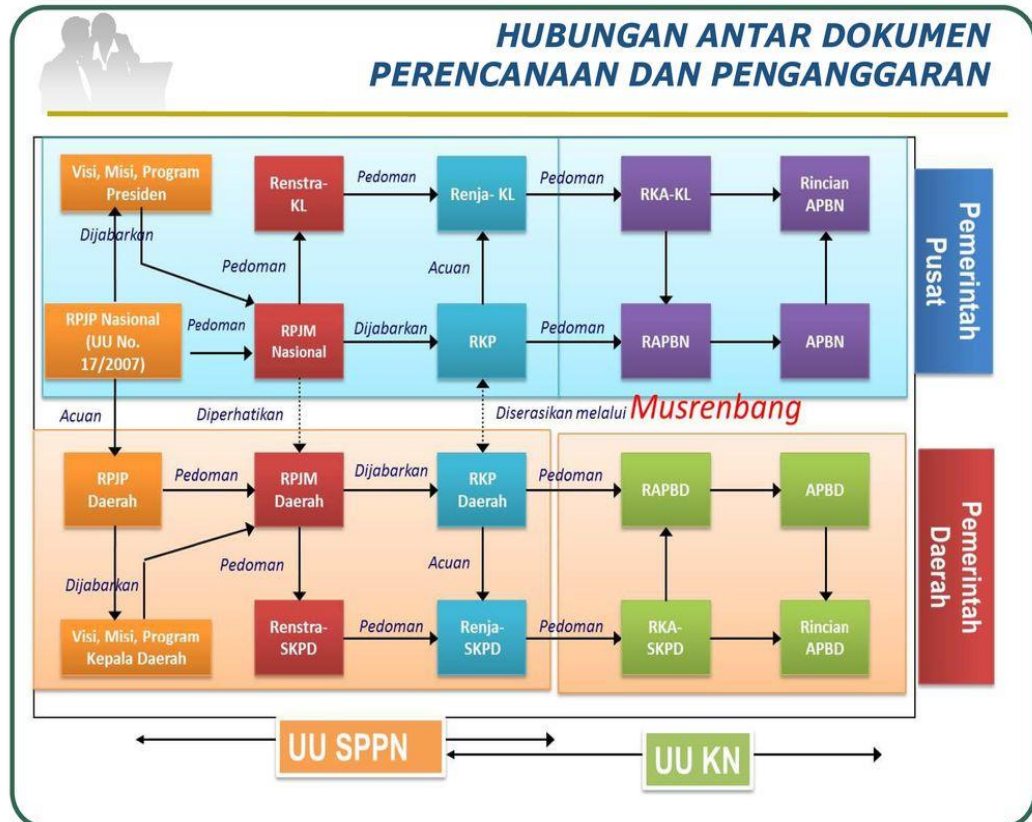
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kota seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010).

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, maka Renstra Sekretariat DPRD sangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Sekretariat DPRD merupakan penjabaran RPJMD Kota Pagar Alam. Renstra Sekretariat DPRD dipakai dasar penyusunan Renja yang selanjutnya dipertanggungjawabkann dalam LAKIP setiap tahun.



Renstra Sekretariat DPRD juga merupakan bahan masukan dalam menyusun RPJMD Kota Pagar Alam tahun 2018-2023

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan dokumen lainnya



Gambar 1.2
Tata cara Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum Penyusunan:

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang rancangan Pembangunan jangka panjang dan rencana kerja Pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2025;



-
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2013 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018;
 15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 16. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 diubah menjadi nomor 48 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk mengoptimalkan arah kebijakan pokok pembangunan sebagaimana Visi dan Misi serta prioritas program tahunan sesuai dengan profil layanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sehingga setiap penggunaan anggaran tepat guna.
2. Untuk melakukan koreksi perencanaan dan penganggaran sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dipagukan oleh Kepala Daerah

Sebagai dasar atau acuan dalam mengajukan usulan di tahun berikutnya



1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam serta susunan garis besar isi dokumen Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM

Mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM.

Mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Telaahan Visi, Misi, telaahan renstra K/L renstra, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis dan Penentuan isu-isu strategis .

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Mencakup: Tujuan dan sasaran Jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam,

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kerjanya di sajikan dalam Tabel 4.1



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mencakup : pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam lima tahun mendatang ;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mencakup : Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 6.1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mencakup : pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam. Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

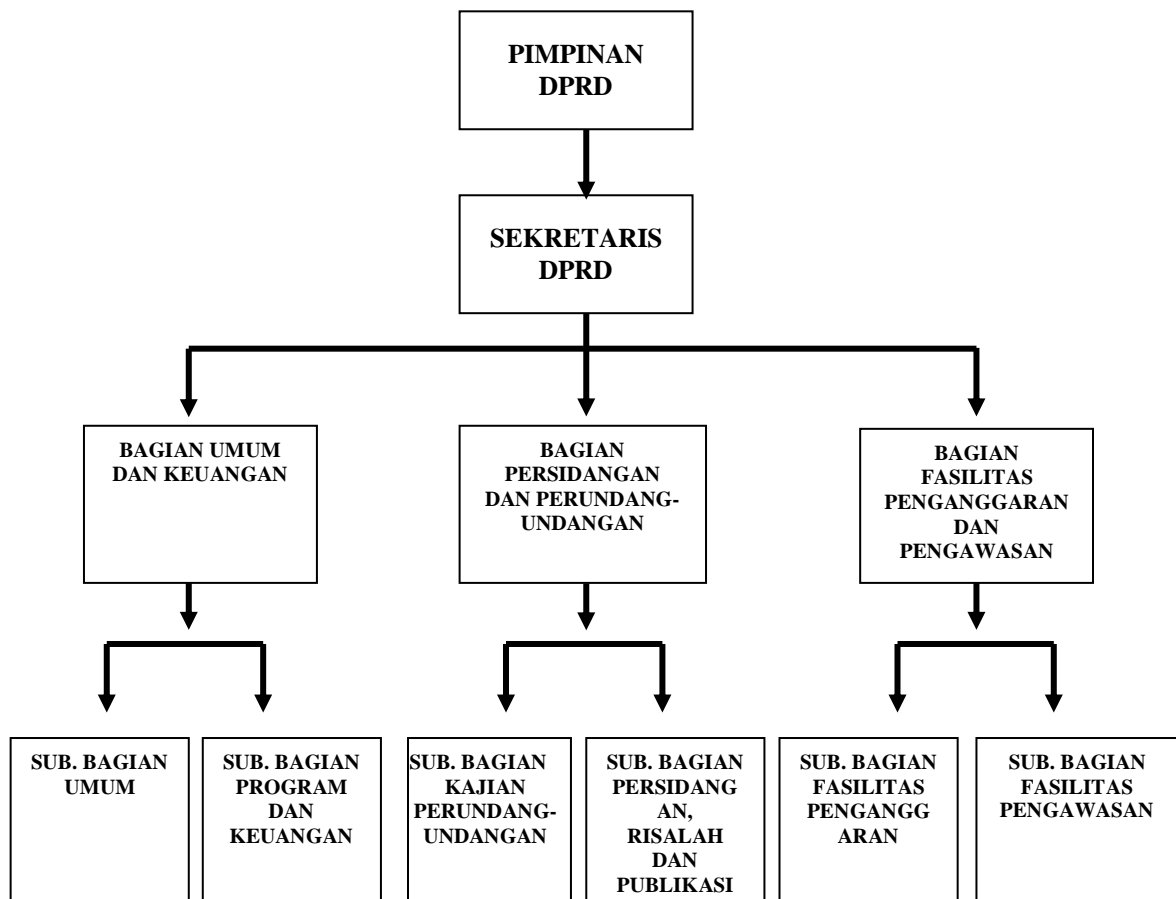
Tugas Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.



Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan
- d. Fasilitasi legislasi, serta penganggaran dan pengawasan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**





Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a) Sekretaris DPRD,
- b) Bagian Umum dan Keuangan,
- c) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, serta
- d) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.

Masing-masing bagian terdiri atas Sub Bagian.

Sekretariat DPRD membawahi Bagian-bagian sebagai berikut :

1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, Administrasi dan sumber daya di bidang Administrasi Kesekretariatan, Program Dan Keuangan DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- i. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;



- k. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- o. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- q. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
dan
- t. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Kepala Bagian Umum Dan Keuangan membawahi dua Sub Bagian yaitu: sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan.

2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian persidangan dan perundang-undangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang legislasi dan Persidangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Persidangan dan perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a) Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b) Memfasilitasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c) Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan Perda inisiatif;
- d) Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan



perundang-undangan;

- e) Mengumpulkan bahan penyiapan draft rancangan Perda Inisiatif;
- f) Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g) Menyusun risalah rapat;
- h) Mengoordinasikan pembahasan rancangan Perda;
- i) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- j) Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k) Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l) Menyelenggarakan publikasi; dan
- m) Menyelenggarakan keprotokolan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi ; Sub. Bagian Kajian Perundang-undangan dan. Sub. Bagian Persidangan, risalah dan publikasi

3. Bagian Fasilitas Penganggaran dan pengawasan

Bagian Pengawasan dan Penganggaran mempunyai tugas memantau Sekretaris Dewan dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penganggaran dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a) Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan APBD / APBD-P;



- c) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan rancangan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- f) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h) Memfasilitasi, mengkoordinasi, dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m) Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan membawahi ; Sub Bagian Fasilitas Penganggaran dan Sub Bagian Fasilitas Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainnya.



Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sampai dengan September 2021 berjumlah 39 orang, terdiri dari para pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan yang berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.2.1.a
KEADAAN PNS SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
MENURUT GOLONGAN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. 1	IV/b	2
2	Pembina	IV/a	2
3	Penata Tk 1	III/d	2
4	Penata	III/c	12
5	Penata Muda TK.I	III/b	9
6	Penata Muda	III/a	6
7	Pengatur	II/c	2
8	Pengatur Muda Tk. 1	II/b	2
9	Pengatur Muda	II/a	2
JUMLAH			39

TABEL 2.2.1.b
KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM



MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	39
2	Paket Pemda	-
3	Tenaga Kerja Sukarela	98
JUMLAH		137

TABEL 2.2.1.c
KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	S-2	9
2	Sarjana (S-1)	23
3	Sarjana Muda	1
4	SLTA	5
5	SD	1
JUMLAH		39
Latar Belakang Pegawai Sekretariat DPRD		
1	Sarjana S-2 Managemen	7
2	Sarjana S-2 Magister Administrasi Publik	2
3	Sarjana Teknik	1
4	Sarjana Pertanian	1
5	Sarjana komputer	3
6	Sarjana Ekonomi	17
7	Sarjana Hukum	1
8	Sarjana Muda Komputer	1
9	SLTA	5
10	SD	1
JUMLAH		39

TABEL 2.2.1.d
KEADAAN PNS SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
MENURUT ESELONERING

NO	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	ESELON
1	Sekretaris DPRD	Pembina TK. I (IV/b)	IIB
2	Kabag Umum dan keuangan	Pembina TK. I (IV/b)	IIIA
3	Kabag Persidangan dan perundang-undangan	Pembina (IV/a)	IIIA



Pemerintah Kota Pagar Alam

4	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Pembina (IV/a)	IIIA
5	Kasubbag Umum	Penata (III/c)	IVA
6	Kasubbag Program dan Keuangan	Penata TK. I (III/d)	IVA
7	Kasubbag Kajian Perundang-undangan	Penata (III/c)	IVA
8	Kasubbag Persidangan, Risalah dan Publikasi	Penata (III/c)	IVA
9	Kasubbag Fasilitasi Pengawasan	Penata TK.I (III/d)	IVA
10	Kasubbag Fasilitasi Penganggaran	Penata (III/c)	IVA

2.2.2 Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, asset/ modal yang tercatat pada Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 18.154.503.110,60,- (Delapan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Sepuluh Koma Enam Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.a
Aset Sekretariat DPRD KPA

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 9.259.198.199,60,-
3	Gedung Dan Bangunan	Rp. 7.812.559.911,00,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 965.685.000,00,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 117.060.000,00,-
TOTAL JUMLAH		Rp 18.154.503.110.60



2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serentak diberlakukan di seluruh Indonesia sejak awal tahun 2001. Desentralisasi dan otonomi daerah dipandang sebagai modal daerah menuju masa depan yang lebih baik dengan mendekatkan layanan ke pada masyarakat, sesuai dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu : (1) Kesejahteraan masyarakat, (2) Peningkatan layanan publik, dan (3) Peningkatan daya saing daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat dijadikan jalan untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas dan nyata harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan secara solid baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat entitas yang paling kecil (kelurahan), kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara. Tanggung jawab secara sadar dan teguh melaksanakan setiap tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam RPJMD Kota Pagar Alam yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

Adapun tabel Indikator dan Target Renstra pelayanan Sekretariat DPRD serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2.



2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

Bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatan kebijakan daerah, karena di dalamnya terdiri para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/representasi masyarakat.

Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan rapat-rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjangkaran aspirasi masyarakat, pendalaman tugas anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota DPRD harus dapat terlaksana dengan baik, transparan dan bermanfaat .

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

- 1 Heterogenitas anggota DPRD yang berbeda, dan pergantian keanggotaan DPRD sehingga membutuhkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara optimal
- 2 Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja anggota DPRD
- 3 Banyaknya tuntutan / aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD yang harus diperjuangkan/direalisasikan sedangkan belum semuanya bisa masuk dalam Prioritas.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota DPRD adalah:

- 1 Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat
- 2 Keharmonisan hubungan antara DPRD dengan stakeholders yang lain
- 3 Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi
- 4 Kemudahan Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi agar mampu menyediakan data dan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan referensi rapat-rapat di DPRD



- 5 Pendokumentasian hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
- 6 Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk pendalaman tugas mampu menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SEKWAN/Tahun					Realisasi Capaian /Tahun					Rasio Capaian / Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN PEMERINTAHAN																		
1	Indikator Kerja Kunci (IKK)																		
	Ketersediaan dokumen RKT kelengkapan DPRD	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
	Ketersediaan program pengawasan DPRD	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
	Ketersediaan bahan penetapan Peraturan Daerah	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																		
	Persentase Bahan Penetapan Peraturan Daerah	%		100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	88,8	100	100	100	100	88,8
	Persentase Kebijakan Perencanaan dan Anggaran yang disepakati	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Bahan Peyusunan Rencana Kerja Tahunan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja	41.951.110.870	49.208.762.433	41.740.892.170	45.580.017.913	49.885.228.905	35.198.898.762	39.328.110.513	39.415.163.689	40.529.303.037	47.879.739.175	82	89	96	93	97	0,05	0,08
A	Belanja Tidak Langsung	2.939.214.270	3.374.419.948	3.028.602.528	3.174.722.626	3.338.844.503	2.325.973.755	3.331.508.348	2.988.176.640	3.090.226.308	3.288.311.339	79,14	98,73	98,67	97,34	98,49	0,04	0,11
B	Belanja Langsung	39.011.896.600	45.834.342.485	38.712.289.642	42.405.295.287	46.546.384.402	32.872.925.007	35.996.602.165	36.426.987.049	37.439.076.729	44.591.427.836	84,26	78,54	94,10	88,29	95,80	0,05	0,08



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan pada gambaran layanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam , serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang di perlukan oleh DPRD• Rasionalisasi struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan Anggaran• Dukungan dari Pimpinan• Sumber Daya Manusia• Sarana dan Prasarana
2	Kelembagaan DPRD	Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan APBD Kota	<ul style="list-style-type: none">• Pengetahuan Dasar tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Bagi Aparatur• Penjaringan Aspirasi melalui reses DPRD
		Menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pengetahuan Dasar tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Bagi Aparatur• Pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas Materi - Materi berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan identifikasi permasalahan



yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, antara lain;

1. Anggaran / Dana masih sangat terbatas.
2. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
 - a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mendorong kinerja Lembaga DPRD;
 - b. Secara Kualitas, kemampuan Aparatur yang Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Pelaporan perlu ditingkatkan Sesuai Kompetensi yang dibutuhkan
 - c. Kualitas SDM yang menangani perencanaan perlu ditingkatkan;
 - d. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;
 - e. Belum adanya sistem pengelolaan asset daerah yang baik;

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam

Mencermati Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar 2018-2023 yaitu :

“Mewujudkan Kota Pagar Alam maju dengan konsep kesejahteraan masyarakat dan Keindahan Ekonomi serta Keadilan dalam memperoleh Pendidikan”

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Pagar Alam yang ditetapkan adalah:

1. **Membangun ekonomi yang berkarakter guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.**
2. **Membangun Area Pasar Tradisional berkonsep modern demi terselenggaranya perputaran roda ekonomi yang baik.**
3. **Membangun pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan konsep perawatan lingkungan yang bersih dan sehat.**



4. **Membangun infrastruktur bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan olah raga.**
5. **Membangun karakter Orang Tua dan Anak untuk memahami pentingnya dunia pendidikan.**

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018 - 2023 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 5 (lima) yaitu : “Membangun Karakter Orang Tua dan Anak untuk memahami pentingnya dunia pendidikan ” dengan tujuan yang mengacu kepada Indeks Reformasi Birokrasi yaitu : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel”.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2018 - 2023 Menetapkan tujuan " Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel”.

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dalam Melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi), Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang



berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Mengingat Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam tidak ada hirarki dengan Sekwan Provinsi Sumsel atau Renstra K/L, maka telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan SKPD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam

Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pagar Alam, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 38 Tahun 2016 yang diubah menjadi nomor 48 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terhadap fungsi tugas dan wewenang anggota DPRD yang secara tegas tertuang dalam Peraturan DPRD Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam. Fungsi DPRD yaitu sebagai lembaga legislasi (pembentukan Perda), anggaran dan, pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD antara lain :

- Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- Memilih Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian



- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dandaerah.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari uraian diatas guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya maka peran Sekretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal. Dengan memberikan fasilitasi pelayanan yang prima sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam memperoleh kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan.

Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD hanya ditinjau dari gambaran pelayan SKPD yang merupakan



faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD berdasarkan identifikasi selama pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mengoptimalkan standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
3. Mengoptimalkan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Reses DPRD sebagai aplikasi dari hasil study banding DPRD agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat terlaksana dengan lebih optimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Sekretariat DPRD, yaitu :

- Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
- Rasionalisasi struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya;
- Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya;
- Penjangkaran Aspirasi melalui reses DPRD
- Hasil-hasil Study Banding DPRD



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

4.1.1. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut :“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel”

4.1.2 SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator



sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: “Meningkatnya Kualitas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel”.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam secara lebih ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.1



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel	IRB	-	-	-	-	-
			Persentase bahan Penetapan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Program pengawasan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Bahan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan Fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan Tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan. Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel 5.1.



Pemerintah Kota Pagar Alam

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Pagar Alam Maju dengan Konsep Kesejahteraan masyarakat dan Keindahan Ekonomi serta Keadilan dalam Memperoleh Pendidikan			
MISI V : Membangun Karakter Orang Tua dan Anak untuk memahami pentingnya Dunia Pendidikan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Sekretariat DPRD dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur dan Anggota DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur dan Anggota DPRD dengan Kualitas yang lebih Unggul dan Modern
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Disiplin Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Upaya Peningkatan Pengetahuan Kompetensi Terapan, dan Etos Kerja Aparatur
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengetahuan Dasar tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Bagi Aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Anggaran Dengan Memperhatikan Prinsip Kesetaraan, berjenjang dan Proporsional
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan, Merencanakan, Menyusun, Mengelola, membina dan Mengawasi Terhadap Tertib Administrasi Keuangan dan Asset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Penyusunan Anggaran Terhadap Dukungan Substansi kinerja DPRD
		<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan Penyusunan Anggaran Terhadap Dukungan Substansi Kinerja DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan DPRD yang Maksimal

		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kemampuan Aparatur yang Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Pelaporan Melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Sesuai Kompetensi yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan keuangan dan Asset dan Kineja disusun oleh Tim Dari Unsur Bidang Terkait dan Apabila Diperlukan Dapat Menghadirkan Narasumber yang Kompeten
		<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin Penyediaan Anggaran Dalam Rangka Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjalannya Hubungan Yang Harmonis Anggota dan Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Seluruh Unsur Pimpinan dan Anggota Untuk Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman Luas Yang Dibutuhkan Atas Materi -Materi Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi DPRD
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan Dukungan Prasarana dan Sarana serta Dukungan Staff dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan Seragam Dinas Beserta Perlengkapannya Bagi Seluruh Aparatur
		<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Mekanisme dan Prosedur Kerja Dukungan Tugas-Tugas DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan Barang dan Jasa Keperluan Kantor Sesuai Kebutuhan
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Motivasi Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kinerja DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Peningkatan Administrasi Manajemen Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPRD yang lebih Optimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kecepatan, Ketepatan, dan keakuratan Pelayanan Administrasi dan Kelengkapan Prasarana kegiatan DPRD



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Serta mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.1

PERMEN 13**FORMULIR DRAFT PERUBAHAN RENSTRA PERIODE 2018-2023**

OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM

[illegible]

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.4.01.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Item	590,128,000	20	843,108,900	20	927,419,790	20	-	-	-	-	-	-	2,360,656,690	60
4.01.4.01.04.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Item	141,651,184	45	228,651,184	45	251,516,302	45	-	-	-	-	-	-	621,818,670	135
4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	item	520,240,000	5	533,320,000	5	586,652,000	5	-	-	-	-	-	-	1,640,212,000	15
4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja makanan dan minuman yang disediakan	item	1,182,400,000	4	1,396,716,000	4	1,536,387,600	4	-	-	-	-	-	-	4,115,503,600	12
4.01.4.01.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	2,911,467,853	81	2,229,418,776	81	2,452,360,654	81	-	-	-	-	-	-	7,593,247,283	243
4.01.4.01.04.01.19	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kerja non PNS yang menerima Upah	Orang	508,500,000	86	579,000,000	86	636,900,000	86	-	-	-	-	-	-	1,724,400,000	258
4.01.4.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	753,896,065	90	617,571,450	90	2,804,357,165	90	-	-	-	-	-	-	4,175,824,679	90
4.01.4.01.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang disediakan	unit	-	0	-	3	2,130,000,000	0	-	-	-	-	-	-	2,130,000,000	3
4.01.4.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Rumah Jabatan	Jumlah rumah/gedung yang layak huni	unit	90,000,000	3	90,000,000	3	90,900,000	3	-	-	-	-	-	-	270,900,000	9
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah rumah/gedung yang layak huni	unit	-	0	200,000,000	1	202,000,000	1	-	-	-	-	-	-	402,000,000	2
4.01.4.01.04.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	unit	837,662,294	24	686,190,500	24	693,052,405	24	-	-	-	-	-	-	2,216,905,199	72
4.01.4.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	543,486,776	100	1,227,300,000	100	1,350,030,000	100	-	-	-	-	-	-	3,120,816,776	100

[illegible]

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.4.01.04.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terselenggaranya Pengembangan Komunikasi , Informasi, dan Media Massa	%	194,347,400	85	99,998,000	85	93,498,130	85	-	-	-	-	-	-	387,843,530	85
4.01.4.01.04.15.08	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah website yang dikelola	website	228,644,000	1	99,998,000	1	109,997,800	1	-	-	-	-	-	-	438,639,800	1
4.01.4.01.04.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Terselenggaranya Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	%	298,803,900	85	365,934,000	85	342,148,290	85	-	-	-	-	-	-	1,006,886,190	85
4.01.4.01.04.18.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah promosi/iklan yang dibayarkan	Item	351,534,000	5	365,934,000	5	402,527,400	5	-	-	-	-	-	-	1,119,995,400	5
TOTAL				32,339,404,490		40,998,393,129		47,365,187,126		-	-	-	-	-	-	-	-
PERMEN 90																	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Capaian Kinerja dan Layanan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	30,774,550,879	90	33,256,823,876	98	38,447,695,570	98	102,485,070,325	98
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	30,015,000	90	40,000,000	100	44,000,000	100	114,015,000	100
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	3	5,500,000	2	15,500,000	6
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA - SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	5,008,000	1	5,000,000	1	5,500,000	1	15,508,000	3

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	4,999,800	1	5,000,000	1	5,500,000	1	15,499,800	3
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	2,500,100	1	5,000,000	1	5,500,000	1	13,000,100	3
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	2,500,100	1	5,000,000	1	5,500,000	1	13,000,100	3
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1	5,500,000	1	15,500,000	3
4.02.01.2.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	5,007,000	1	10,000,000	2	11,000,000	3	26,007,000	6
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	4,101,508,491	90	4,191,453,541	100	4,630,598,895	100	12,923,560,927	100
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	-	-	-	-	-	-	3,554,411,491	40	3,726,336,291	40	4,098,969,920	40	11,379,717,702	120
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	-	-	-	-	-	-	315,960,000	1	321,840,000	1	354,024,000	1	991,824,000	3

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	214,867,340	8	117,807,250	1	129,587,975	1	462,262,565	10
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	16,269,660	1	25,470,000	1	28,017,000	1	69,756,660	3
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	191,722,353	90	178,535,863	100	226,389,449	100	596,647,665	100
4.02.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	191,722,353	1	178,535,863	1	196,389,449	1	566,647,665	3
4.02.01.2.03.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	100	5,000,000	100
4.02.01.2.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.03.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	324,408,000	90	292,358,000	83	308,083,000	83	924,849,000	83
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	-	-	-	139,300,000	3	107,250,000	3	117,975,000	3	364,525,000	9
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	5,000,000	50	5,000,000	50
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	185,108,000	5	185,108,000	5	185,108,000	5	555,324,000	15

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	4,963,723,099	90	3,718,361,548	100	4,215,197,809	100	12,897,282,456	100
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	49,958,238	2	49,998,938	2	49,998,938	2	149,956,114	6
4.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	299,365,950	1	199,292,500	1	219,221,750	1	717,880,200	3
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	298,548,931	2	276,577,760	2	304,235,536	2	879,362,227	6
4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	423,980,700	2	396,000,000	2	435,600,000	2	1,255,580,700	6
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	145,029,280	2	95,247,350	2	104,772,085	2	345,048,715	6
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	-	-	-	-	-	-	600,880,000	1	556,005,000	1	611,605,500	1	1,768,490,500	3
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	3	20,000,000	3
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	12	50,000,000	12
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	3,145,960,000	1	2,145,240,000	1	2,359,764,000	1	7,650,964,000	3
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	2	20,000,000	5	20,000,000	7

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	40,000,000	2	40,000,000	3
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	-	-	-	-	1,031,003,500	90	623,000,000	0	1,955,000,000	100	3,609,003,500	100
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	515,263,000	1	200,000,000	1	750,000,000	1	1,465,263,000	3
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	35,000,000	1	60,000,000	2	95,000,000	3
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	196,350,000	51	198,000,000	25	200,000,000	5	594,350,000	81
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	319,390,500	18	190,000,000	10	300,000,000	5	809,390,500	33
4.02.01.2.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.01.2.07.08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit aset tak berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	25,000,000	1	25,000,000	1
4.02.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	200,000,000	1	200,000,000	1
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	200,000,000	1	200,000,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	200,000,000	1	200,000,000	1
4.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-	-	1,305,600,000	90	1,307,958,000	100	1,450,753,800	100	4,064,311,800	100
4.02.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	-	-	-	-	-	-	12,600,000	1	12,600,000	1	13,860,000	1	39,060,000	3
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	207,000,000	3	209,358,000	3	230,293,800	3	646,651,800	9
4.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	12	12,000,000	12
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	1,086,000,000	107	1,086,000,000	107	1,194,600,000	107	3,366,600,000	321
4.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	-	-	-	-	1,811,365,100	90	1,316,500,900	100	1,680,150,990	100	4,808,016,990	100
4.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	-	-	862,208,100	6	612,206,900	6	673,427,590	6	2,147,842,590	18
4.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	307,700,000	20	306,080,000	20	336,688,000	20	950,468,000	60

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	86,000,000	1	86,000,000	1
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	99,750,000	58	99,920,000	58	109,912,000	58	309,582,000	174
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	12,000,000	4	12,000,000	4
4.02.01.2.09.08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	14,000,000	4	14,000,000	4
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	4	50,000,000	4
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	4	50,000,000	4
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	541,707,000	4	298,294,000	4	328,123,400	4	1,168,124,400	12
4.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	20,000,000	4	20,000,000	4
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	-	-	-	-	-	-	14,970,728,636	90	19,544,179,774	100	21,628,597,751	100	56,143,506,161	100
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	-	-	-	-	-	-	14,692,728,636	25	19,175,179,774	25	21,092,697,751	25	54,960,606,161	75
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	278,000,000	4	369,000,000	4	405,900,000	4	1,052,900,000	12
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check-Up DPRD	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000	26	130,000,000	26
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	-	-	-	-	-	-	2,044,476,700	90	2,044,476,250	100	2,308,923,875	100	6,403,876,825	100

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	10,000,000	1	11,000,000	1
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	50,000,000	1	55,000,000	1
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-	544,476,700	3	544,476,250	3	598,923,875	3	1,687,876,825	9
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000	3	1,500,000,000	3	1,650,000,000	3	4,650,000,000	9
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	-	-	-	-	-	-	26,730,502,110	100	25,401,530,700	100	30,460,542,510	100	82,592,575,320	100
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	-	-	-	-	-	-	4,534,177,050	100	4,403,236,400	100	3,097,430,020	100	12,034,843,470	100
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	1,503,118,200	1	20,000,000	1	1,523,118,200	2
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	3,137,176,950	1	1,503,118,200	1	1,653,430,020	1	6,293,725,170	3
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	15,000,000	1	15,000,000	1
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik yang	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	12,000,000	1	12,000,000	1
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,397,000,100	1	1,397,000,000	1	1,397,000,000	1	4,191,000,100	3


KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	%	-	-	-	-	-	-	7,226,033,400	100	7,203,469,800	100	9,123,816,780	100	23,553,319,980	100
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,432,823,900	1	1,410,259,550	1	1,551,285,505	1	4,394,368,955	3
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,443,322,400	1	1,443,322,200	1	1,587,654,420	1	4,474,299,020	3
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,503,118,100	1	1,503,118,200	1	1,653,430,020	1	4,659,666,320	3
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,433,118,000	1	1,433,118,450	1	1,576,430,295	1	4,442,666,745	3
4.02.02.2.02.05	Pembahasan laporan semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per semester	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,413,651,000	1	1,413,651,400	1	1,555,016,540	1	4,382,318,940	3
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	%	-	-	-	-	-	-	1,419,126,000	100	1,397,126,100	100	1,676,838,710	100	4,493,090,810	100
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.07	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penggunaan anggaran	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,419,126,000	1	1,397,126,100	1	1,536,838,710	1	4,353,090,810	3
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan Kapasitas DPRD	%	-	-	-	-	-	-	2,329,948,660	100	2,073,500,000	100	4,915,838,760	100	9,319,287,420	100
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen									0	-	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1
4.02.02.2.04.02	Bimbingan teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimbingan teknis DPRD	Orang									0	-	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1
4.02.02.2.04.02	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD	dokumen											50,000,000	25	50,000,000	25
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	-	-	-	-	-	-	625,959,900	1	564,700,000	1	621,170,000	1	1,811,829,900	3
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	-	-	-	-	-	-	0	0	118,800,000	3	130,680,000	3	249,480,000	6

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	5,000,000	6	5,000,000	6
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	1,703,988,760	1	1,390,000,000	1	1,703,988,760	1	4,797,977,520	3
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%	-	-	-	-	-	-	808,935,000	100	534,812,400	100	688,293,640	100	2,032,041,040	100
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	12	50,000,000	12
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	1	50,000,000	1
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	-	-	-	-	-	-	808,935,000	3	534,812,400	3	588,293,640	3	1,932,041,040	9
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan pengawasan	%	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	50,000,000	100	50,000,000	100
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	1	50,000,000	1
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	1	50,000,000	1
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja sama daerah	%	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	10,000,000	100	10,000,000	100
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	dokumen							0	0	-	0	5,000,000	1	5,000,000	1
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	5,000,000	1	5,000,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
				Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi DPRD	%	-	-	-	-	-	-	10,412,282,000	100	9,789,386,000	100	10,898,324,600	100	31,099,992,600	100
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	10,412,282,000	1	9,789,386,000	1	10,768,324,600	1	30,969,992,600	3
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	50,000,000	1	50,000,000	1
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	30,000,000	1	30,000,000	1
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	50,000,000	1	50,000,000	1
TOTAL				-	-	-	-	-	-	57,505,052,989	-	58,658,354,576	-	68,848,238,080	-	185,017,645,645	-

Pagar Alam, 30 Desember 2021
Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam


Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008



BAB VII

KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Bahan Penetapan Peraturan Daerah	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Program Pengawasan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Bahan Peyusunan Rencana Kerja Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 – 2023.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran DPRD Kota Pagar Alam, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pagar alam, 30 Desember 2021

Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam



Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008

LAMPIRAN

**LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA
RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 TERHADAP
PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**
Nomor :
Tanggal :

HASIL PEMETAAN

PROGRAM/KEGIATAN PADA RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 TERHADAP PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM
Jumlah program : 9 program
Jumlah kegiatan : 49 kegiatan

Jumlah program : 3 program
Jumlah kegiatan : 12 kegiatan
Jumlah sub kegiatan : 46 sub kegiatan

Jumlah program : 2 program
Jumlah kegiatan : 15 kegiatan
Jumlah sub kegiatan : 42 sub kegiatan

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
REDAK URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari t-Planning))	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	4.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
							4.02.01.2.03		Administrasi Umum						4.02.01.2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
	4.01.4.01.4.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang dibeli	1880 lbr		4.02.01.2.03.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang dibeli,jasa admin & surat yang dibayarkan	2130 lbr, 3 org		42,744,000	4.02.01.2.08.01				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang dibeli	1260 lembar	12,600,000
	4.01.4.01.4.01.02		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening		4.02.01.2.03.02			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening		180,000,000	4.02.01.2.08.02			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening		207,000,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
															4.02.01.2.03		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah					
	4.01.4.01.4.01.05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah asuransi yang dibayarkan	28 unit		4.02.01.2.03.05			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah asuransi yang dibayarkan	28 unit		163,876,353	4.02.01.2.03.02			Pengamanan barang milik daerah SKPD	Frekuensi asuransi yang dibayarkan	1 kali/th		163,876,353
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
															4.02.01.2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
	4.01.4.01.4.01.03		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	24 unit		4.02.01.2.03.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	24 unit		44,750,000	4.02.01.2.09.01				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan	5 unit	22,500,000
															4.02.01.2.09.02			Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan	19 unit		23,450,000
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning))	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
															4.02.01.2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
	4.01.4.01.4.01.60		Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis	Jumlah orang penerima upah	75 orang		4.02.01.2.03.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang dibayarkan	90 orang	954,000,000		4.02.01.2.08.04				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Frekuensi upah yang dibayarkan	12 bulan	1,086,000,000		
	4.01.4.01.4.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah yang dibayarkan	8 orang		4.02.01.2.03.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah yang dibayarkan	8 orang	288,000,000											
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
															4.02.01.2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah						
	4.01.4.01.4.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis		4.02.01.2.03.09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis	88,650,000		4.02.01.2.09.06				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah alat kerja yang diperbaiki	5 jenis	85,370,000		
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
															4.02.01.2.06			Administrasi umum perangkat daerah						
	4.01.4.01.4.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang siap pakai	63 item		4.02.01.2.03.10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang siap pakai	63 item	199,993,200											
	4.01.4.01.4.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60 item		4.02.01.2.03.13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60 item	297,369,600		4.02.01.2.06.02				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	58 item	199,324,950		
	4.01.4.01.4.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	24 item		4.02.01.2.03.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	24 item	183,999,750		4.02.01.2.06.05				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap pakai	15 item	95,359,110		
	4.01.4.01.4.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	3 item		4.02.01.2.03.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	3 item	49,995,279		4.02.01.2.06.01				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPRD dan Rumjab	14 item	49,958,238		
	4.01.4.01.4.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	45 item		4.02.01.2.03.14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	45 item	276,594,581		4.02.01.2.06.03				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang siap pakai	44 item	276,589,555		
	4.01.4.01.4.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	48 jenis		4.02.01.2.03.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	48 jenis	264,000,000		4.02.01.2.06.06				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan	4 item	600,480,000		
	4.01.4.01.4.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak		4.02.01.2.03.17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak	395,955,000		4.02.01.2.06.04				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan dan minum yang dibeli	13290 kotak	395,983,500		
	4.01.4.01.4.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	41 orang		4.02.01.2.03.18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	41 orang	1,856,127,000		4.02.01.2.06.09				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi pegawai yang melakukan perjalanan dinas	12 bulan	1,948,960,000		
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
	4.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													4.02.01.2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah						

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari i-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
	4.01.4.01.4.02.20		Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang layak huni	3 rumah		4.02.01.2.03.26				Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang layak huni	3 rumah	299,880,000	4.02.01.2.09.11				Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rumah/gedung yang layak huni	3 rumah, 1gedung kantor	350,300,000		
	4.01.4.01.4.02.22		Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak huni	1 gedung		4.02.01.2.03.28				Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak huni	1 gedung	199,906,000										
4.01.4.01.4.02.24			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	24 unit		4.02.01.2.03.30				Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	24 unit	762,351,600	4.02.01.2.09.01				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan yang dibayarkan	5 unit	437,010,000		
															4.02.01.2.09.02				Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perorangan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan yang dibayarkan	19 unit	284,250,000		
															4.02.01.2.09.09				Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor /bangunan lainnya	4 unit	-		
															4.02.01.2.09.10				Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	4 unit	-		
4.01.03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																						
							4.02.01.2.04			Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur														
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
															4.02.01.2.05			Administrasi kepegawain perangkat daerah						
4.01.4.01.4.03.02			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	175 stel		4.02.01.2.04.02				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	3stel	8,000,000	4.2.01.2.05.02				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	165 stel	57,750,000		
4.01.4.01.4.03.05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan batik yang dibeli	235 stel		4.02.01.2.04.05				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan batik yang dibeli	235 stel	91,350,000										
4.01.05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR													4.2.01.2.05.10				Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	socialiasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 kali	-		
4.01.4.01.4.05.03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	0		4.02.01.2.04.11				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	4 orang	199,562,000	4.2.01.2.05.11				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek/asdeski	1 orang	185,108,000		
4.01.4.01.4.05.35			Mengikuti rapat-rapat kerja nasional Asosiasi Sekretariat DPRD seluruh Indonesia (ASDEKSI)	Jumlah peserta yang mengikuti ASDEKSI	4 orang																			
4.01.06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																						

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
							4.02.01.2.01			Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah														
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
															4.02.01.2.01			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
	4.01.4.06.16		Penyusunan Renja	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.01			Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		10,000,000	4.02.01.2.01.01			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen		5,000,000		
	4.01.4.01.4.06.22		Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.02			Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		35,000,000	4.02.01.2.01.02			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		5,008,000		
															4.02.01.2.01.03			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		4,999,800		
															4.02.01.2.01.04			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		2,500,100		
															4.02.01.2.01.05			Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		2,500,100		
	4.01.4.01.4.06.24		Penyusunan TAPKIN	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen																			
	4.01.4.01.4.06.26		Penyusunan LPPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.01.03			Penyusunan dokumentasi evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		20,000,000	4.02.01.2.01.07			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		5,007,000		
							4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
							4.02.01.2.02			Administrasi Keuangan					4.02.01.2.02			Administrasi keuangan perangkat daerah						
							4.02.01.2.02.01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (Gaji 13, dan 14),terbayarnya beban kerja (BK)	14 bulan, 12 bulan		3,658,693,990	4.02.01.2.02.01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (Gaji 13, dan 14),terbayarnya beban kerja (BK)	14 bulan, 12 bulan		3,667,054,927		
	4.01.4.01.4.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang dibayarkan	19 orang		4.02.01.2.02.02			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah orang yang menerima honor	18 orang		365,040,000	4.02.01.2.02.02			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Frekuensi pegawai yang menerima honorarium	9 bulan		223,290,000		
	4.01.4.01.4.06.04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.09			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		24,269,900	4.2.1.2.02.5			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		16,269,660		
	4.01.4.01.4.06.25		Penyusunan rekapitulasi realisasi SPP dan SPM	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen										4.2.1.2.02.3			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen		80,000,250		
	4.01.4.01.4.06.40		Penatausahaan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.04			Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen		87,999,960										
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari I-Planning)	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
															4.02.01.2.01			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
	4.01.4.01.4.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		4.02.01.2.02.06			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen		5,000,000	4.02.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	5,000,000		
	4.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																						
							4.02.02		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
							4.02.02.2.01		Layanan administrasi DPRD						4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD							
	4.01.4.01.4.15.03		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah makan minum yang tersedia	2500 kotak		4.02.02.2.01.02			Fasilitas rapat DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	11 rapat		773,398,960	4.02.01.2.16.03				Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	11 rapat	544,476,700		
							4.02.01.2.03.17		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi umum	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang dibeli	4320 kotak	1,140,000,000	4.02.01.2.16.04				Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga DPRD yang tersedia	3 pimpinan	1,500,000,000		
															4.02.01.2.16.01				Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	administrasi keanggotaan DPRD yang diselenggarakan	25 anggota	-		
															4.02.01.2.16.02				Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang difasilitasi	7 fraksi	-		
															4.02.01.2.14			Pelaksanaan protokol dan komunikasi Pimpinan						
															4.02.01.2.14.01				Fasilitas keprotokolan	Jumlah keprotokolan yang difasilitasi	3 kegiatan	0		
															4.02.01.2.14.02				Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah komunikasi pimpinan yang difasilitasi	10 kegiatan	-		
															4.02.01.2.14.03				Pendokumentasian tugas pimpinan	tugas pimpinan yang didokumentasikan	12 kegiatan	-		
	4.01.4.01.4.15.04		Rapat-rapat paripurna	jenis rapat yang dilaksanakan	3 jenis																			
	4.01.4.01.4.15.24		Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW)	Jumlah orang yang dilantik																				
							4.02.02		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN						4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA							
							4.02.02.2.01		Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD						4.02.01.2.15		Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD							
							4.02.02.2.01.01			Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan tunjangan DPRD	25 orang		15,347,179,778	4.02.01.2.15.01				Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah penerima Gaji dan tunjangan DPRD	25 orang	15,347,179,774		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning))	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
							4.02.02.2.01.03				Pelaksanaan medical cek up DPRD	Frekuensi medical check up yang dilaksanakan	1 kali		4.02.01.2.15.03				Pelaksanaan medical cek up DPRD	Frekuensi medical check up yang dilaksanakan	1 kali		0	
	4.01.4.01.4.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	175 stel		4.02.01.2.04.02		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	185 stel	200,000,000	4.02.01.2.15.02				Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	78 stel		208,000,000	
															4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
															4.02.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					-	
															4.02.01.2.07.01				Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit		-	
															4.02.01.2.07.02				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	5 unit mtr		-	
															4.02.01.2.07.05				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10 unit		-	
															4.02.01.2.07.06				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	12 unit		-	
															4.02.01.2.07.09				Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit		-	
															4.02.01.2.07.10				Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 item		-	
															4.02.01.2.07.11				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 item		-	
							4.02.03		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
							4.02.03.2.02			Pembahasan kebijakan anggaran					4.02.02.2.02			Pembahasan kebijakan anggaran						
	4.01.4.01.4.15.23		Konsultasi pembahasan dan paripurna KUA PPAS APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.01			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,408,649,100		4.02.02.2.02.01				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,432,823,900	
	4.01.4.01.4.15.27		Pembahasan RAPBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.03			Pembahasan APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-		4.02.02.2.02.03				Pembahasan APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-	
	4.01.4.01.4.15.29		Konsultasi, pembahasan dan paripurna KUPA PPAP	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.02			Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,407,866,750		4.02.02.2.02.02				Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,443,322,400	
	4.01.4.01.4.15.42		Pembahasan RAPBD Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.04			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,326,536,000		4.02.02.2.02.04				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,433,118,000	
	4.02.4.01.4.17.04		Pembahasan LKPI Walikota Pagar Alam	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen																			
	4.02.4.01.4.17.06		Pembahasan rancangan daerah laporan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.06			Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen	1,407,470,000		4.02.02.2.02.06				Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,413,651,000	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019									
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
															4.02.02.2.02.05				Pembahasan laporan semester	jumlah laporan yang dibahas	1 dokumen	-		
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
															4.02.02.2.03			Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan						
	4.02.4.01.4.17.04		Pembahasan LKPI Walikota Pagar Alam	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.02.02.06			Pembahasan pertanggungjawaban APBD	jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen		1,555,998,400	4.02.02.2.03.08			Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,419,126,000		
															4.02.02.2.03.01			Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Hukum	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-		
															4.02.02.2.03.02			Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-		
															4.02.02.2.03.03			Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-		
															4.02.02.2.03.04			Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-		
															4.02.02.2.03.05			Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-		
															4.02.02.2.03.06			Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-		
															4.02.02.2.03.07			Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-		
							4.02.03		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
							4.02.03.2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD					4.02.02.2.04			Peningkatan lapasitas DPRD						
	2.10.4.01.4.15.03		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah website yang di upgrade	1 website		4.02.03.2.04.03			Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah website yang diupgrade dan jenis dokumentasi,	1 website dan 3 jenis iklan		254,400,000	4.02.02.2.04.03			Publikasi dan dokumentasi dewan	jenis dokumentasi publikasi yang dilaksanakan	1 website dan 4 jenis iklan		264,000,000		
	2.10.4.01.4.18.01		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jenis dokumentasi dan publikasi yang dilaksanakan	3 jenis iklan																			
	4.01.4.01.4.15.07		Penyediaan jasa advokasi	Jumlah tenaga ahli hukum	2 orang		4.02.03.2.04.04			Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah tenaga ahli yang tersedia	2 orang		99,600,000	4.02.02.2.04.04			Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	jumlah tenaga ahli yang tersedia	2 orang		-		
	4.01.4.01.4.15.16		Penyusunan dan pembahasan rencana kerja DPRD kota Pagar	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.04.07			Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		1,338,067,970	4.02.02.2.04.07			Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen		1,703,989,060		
															4.02.02.2.04.01			Orientasi DPRD	orientasi DPRD yang dilaksanakan	1 kali		-		
															4.02.02.2.04.02			Bimbingan teknis DPRD	bimtek DPRD yang dilaksanakan	1 kali		-		
															4.02.02.2.04.05			Penyediaan tenaga ahli fraksi	tenaga ahli fraksi yang disediakan	5 org		-		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning)	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
															4.02.02.2.04.06				Penyelenggaraan hubungan masyarakat	frekuensi hubungan masyarakat yang diselenggarakan	3 kali	-
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.05			Penyerapan dan pengumpulan aspirasi masyarakat					4.02.02.2.05			Penyerapan dan pengumpulan aspirasi masyarakat				
															4.02.02.2.05.01				Kunjungan kerja dalam daerah	frekuensi kunjungan kerja yang dilaksanakan	3 kali	-
															4.02.02.2.05.02				Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
	4.01.4.01.4.15.37		Kegiatan Reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali		4.02.03.2.05.03			Pelaksanaan reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali		342,488,000	4.02.02.2.05.03				Pelaksanaan reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	2 kali	534,812,000
	4.02.17	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN																				
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.01			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					4.02.02.2.01				Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD			
							4.02.03.2.01.01			Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		634,695,490	4.02.02.2.01.01				Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	0
	4.01.4.01.4.15.01		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.01.02			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		1,695,497,000	4.02.02.2.01.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1,448,587,900
	4.02.4.01.4.17.05		Pembahasan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		4.02.03.2.01.05			Penyusunan tata tertib DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-	4.02.02.2.01.05				Penyusunan tata tertib DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.01.03				Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	jumlah perundang-undangan yang dikaji	3 bahan	
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
							4.02.03.2.06			Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD					4.02.02.2.06				Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD			
							4.02.03.2.06.01			Penyusunan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		-	4.02.02.2.06.01				Penyusunan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.06.02				Pengawasan kode etik DPRD	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-
															4.02.02.2.07			Pembahasan kerja sama daerah				
															4.02.02.2.07.01				Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019								PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Disisi dari I-Planning))	PROGRAM (Disisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Disisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	
															4.02.02.2.07.02				Penyusunan bahan komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	
															4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
							4.02.03.2.08			Fasilitasi tugas pimpinan DPRD					4.02.02.2.08			Fasilitasi Tugas DPRD					
4.01.4.01.4.15.06			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang		4.02.03.2.08.01			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang		8,946,344,000	4.02.02.2.08.01			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti perjalanan dinas	25 orang		9,748,074,000	
															4.02.02.2.08.02			Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen		0	
															4.02.02.2.08.03			Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah tugas yang difasilitasi	3 kali		0	
															4.02.02.2.08.04			Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah tugas yang difasilitasi	3 kali		0	
JUMLAH						-	JUMLAH							48,931,299,661									48,939,660,277

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KETUA TAPD,
Drs. Samsul Bahri Burlian, M.Si
NIP. 196607121986031001

ANGGOTA TAPD :
KEPALA BAPPEDA,
Novi Apriyadi, SE.MM
NIP. 197711052003121004

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,
Iwan Mieke Wijaya, ST.MM
NIP. 197611102003121005

KABAG. ADM. PEMBANGUNAN,
Budiarjo Sahar, S.Pd.MM
NIP. 197004151998021004

Pagar Alam, 2020
Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam


Rano Fahlesi, SE, M.Si
NIP.197707262003121008



Pemerintah Kota Pagar Alam

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Pagar Alam Maju dengan Konsep Kesejahteraan masyarakat dan Keindahan Ekonomi serta Keadilan dalam Memperoleh Pendidikan			
MISI V : Membangun Karakter Orang Tua dan Anak untuk memahami pentingnya Dunia Pendidikan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Sekretariat DPRD dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Inovatif, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur dan Anggota DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur dan Anggota DPRD dengan Kualitas yang lebih Unggul dan Modern
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Disiplin Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Upaya Peningkatan Pengetahuan Kompetensi Terapan, dan Etos Kerja Aparatur
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengetahuan Dasar tentang Peraturan dan Perundang-Undangan Bagi Aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Anggaran Dengan Memperhatikan Prinsip Kesetaraan, berjenjang dan Proporsional
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan, Merencanakan, Menyusun, Mengelola, membina dan Mengawasi Terhadap Tertib Administrasi Keuangan dan Asset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Penyusunan Anggaran Terhadap Dukungan Substansi kinerja DPRD
		<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan Penyusunan Anggaran Terhadap Dukungan Substansi Kinerja DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan DPRD yang Maksimal

		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kemampuan Aparatur yang Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Pelaporan Melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Sesuai Kompetensi yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan keuangan dan Asset dan Kineja disusun oleh Tim Dari Unsur Bidang Terkait dan Apabila Diperlukan Dapat Menghadirkan Narasumber yang Kompeten
		<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin Penyediaan Anggaran Dalam Rangka Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjalannya Hubungan Yang Harmonis Anggota dan Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Seluruh Unsur Pimpinan dan Anggota Untuk Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman Luas Yang Dibutuhkan Atas Materi -Materi Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi DPRD
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan Dukungan Prasarana dan Sarana serta Dukungan Staff dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan Seragam Dinas Beserta Perlengkapannya Bagi Seluruh Aparatur
		<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Mekanisme dan Prosedur Kerja Dukungan Tugas-Tugas DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan Barang dan Jasa Keperluan Kantor Sesuai Kebutuhan
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Motivasi Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kinerja DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Peningkatan Administrasi Manajemen Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPRD yang lebih Optimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kecepatan, Ketepatan, dan keakuratan Pelayanan Administrasi dan Kelengkapan Prasarana kegiatan DPRD

FORMULIR DRAFT PERUBAHAN RENSTRA PERIODE 2018-2023

OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	(Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah+Persentase administrasi keuangan perangkat daerah+persentase administrasi barang milik daerah pd perangkat daerah+persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah+persentase administrasi umum perangkat daerah+persentase pengadaan barang milik daerah+persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah+persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan+persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan+persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD+Persentase layanan administrasi DPRD)/11	%	-	-	-	-	-	-	28,428,470,017	90	32,111,317,019	98	35,322,448,721	98	95,114,635,756	100
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg tersusun / jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg direncanakan	%	-	-	-	-	-	-	30,015,000	100	33,016,500	100	36,318,150	100	99,349,650	100
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg tersusun		dokumen								10		10		10		10

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg direncanakan		dokumen								10		10		10		10
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja yang tersusun	Jumlah dokumen Renstra, Renja yang tersusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	5,000,000	2	5,500,000	2	6,050,000	2	16,550,000	2
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	5,008,000	1	5,508,800	1	6,059,680	1	16,576,480	1
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersusun	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	4,999,800	1	5,499,780	1	6,049,758	1	16,549,338	1
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	2,500,100	1	2,750,110	1	3,025,121	1	8,275,331	1
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	2,500,100	1	2,750,110	1	3,025,121	1	8,275,331	1
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun	Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	16,550,000	1
4.02.01.2.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD, Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	Jumlah dokumen LPPD, Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	5,007,000	3	5,507,700	3	6,058,470	3	16,573,170	3
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah + persentase gaji, tunjangan ASN dan honorarium ASN yang dibayarkan / 2	%	-	-	-	-	-	-	3,986,775,837	100	4,385,453,421	100	4,823,998,763	100	13,196,228,020	100
		Jumlah dokumen keuangan yang tersusun		dokumen								2		2		2		2

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah dokumen keuangan yang direncanakan		dokumen								2		2		2		2
		Gaji, tunjangan ASN dan honorarium ASN yang bayarkan		ob								716		716		716		716
		Gaji, tunjangan ASN dan honorarium ASN yang disediakan		ob								716		716		716		716
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	ob	-	-	-	-	-	-	3,667,215,927	560	4,033,937,520	560	4,437,331,272	560	12,138,484,718	560
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Honorarium ASN yang dibayarkan	Honorarium ASN yang dibayarkan	ob	-	-	-	-	-	-	223,290,000	156	245,619,000	156	270,180,900	156	739,089,900	156
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	80,000,250	1	88,000,275	1	96,800,303	1	264,800,828	1
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	16,269,660	1	17,896,626	1	19,686,289	1	53,852,575	1
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	persentase asuransi kendaraan yang dibayarkan/persentase asuransi kendaraan yang disediakan	%	-	-	-	-	-	-	191,722,353	100	210,894,588	100	231,984,047	100	634,600,988	100
		Jumlah asuransi kendaraan yang dibayarkan		unit								24		24		24		24
		Jumlah asuransi kendaraan yang disediakan		unit								24		24		24		24

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah asuransi kendaraan yang dibayarkan		unit	-	-	-	-	-	-	191,722,353	24	210,894,588	24	231,984,047	24	634,600,988	24
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah pakaian dinas yang dibeli/jumlah pakaian dinas yg tersedia+Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan/Jumlah peserta yang akan mengikuti sosialisasi peraturan-undangan+Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis ASDEKSI/Jumlah peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis ASDEKSI)/3	%	-	-	-	-	-	-	242,858,000	100	367,143,800	83	403,858,180	83	924,859,980	100
		Jumlah pakaian dinas yang tersedia		stel								165		165		165		495
		Jumlah pakaian dinas yang akan disediakan		stel								165		165		165		495
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		ok								0		50		50		100
		Jumlah peserta yang akan mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		ok								0		100		100		100
		Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis ASDEKSI		ok								10		10		10		30
		Jumlah peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis ASDEKSI		ok								10		10		10		30

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	-	-	-	-	-	-	57,750,000	165	63,525,000	165	69,877,500	165	191,152,500	495
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	ok	-	-	-	-	-	-	-	0	100,000,000	50	110,000,000	50	121,000,000	100
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis ASDEKSI	Jumlah peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis ASDEKSI	ok	-	-	-	-	-	-	185,108,000	10	203,618,800	10	223,980,680	10	612,707,480	30
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Jumlah ATK, Jumlah peralatan rumah tangga dan Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia+Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia+Jumlah makanan dan minuman yang tersedia+Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi dan frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana+Jumlah dokumen arsip aktif dan arsip inaktif yang tersedia+Jumlah aplikasi sistem informasi berbasis elektronik yang dibuat/Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Jumlah ATK, Jumlah peralatan rumah tangga dan Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang akan disediakan+Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan+Jumlah makanan dan minuman yang disediakan+Frekuensi kunjungan tamu dan frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang direncanakan+Jumlah dokumen arsip aktif dan arsip inaktif yang	%	-	-	-	-	-	-	3,567,055,353	100	4,023,760,888	100	4,426,136,977	100	11,927,953,218	100
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Jumlah ATK, Jumlah peralatan rumah tangga dan Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia		pcs								56561		56561		56561		169683

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Jumlah ATK, Jumlah peralatan rumah tangga dan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang akan disediakan		pcs								56561		56561		56561		169683
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		exemplar								66072		66072		66072		198216
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		exemplar								66072		66072		66072		198216
		Jumlah makanan dan minuman yang tersedia		kotak								13290		13290		13290		39870
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		kotak								13290		13290		13290		39870
		Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi dan frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana		kali								59		71		71		71
		Frekuensi kunjungan tamu dan frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang direncanakan		kali								59		71		71		71
		Jumlah dokumen arsip aktif dan arsip inaktif yang tersedia		dokumen								0		2		2		2

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah dokumen arsip aktif dan arsip inaktif yang disediakan		dokumen								0		2		2		2
		Jumlah aplikasi sistem informasi berbasis elektronik yang dibuat		aplikasi								0		1		1		2
		Jumlah aplikasi sistem informasi berbasis elektronik yang direncanakan		aplikasi								0		1		1		2
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	pcs	-	-	-	-	-	-	49,958,238	377	54,954,062	377	60,449,468	377	165,361,768	1,131
4.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	pcs	-	-	-	-	-	-	199,324,950	3,671	219,257,445	3,671	241,183,190	3,671	659,765,585	11,013
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	pcs	-	-	-	-	-	-	276,589,555	3,776	304,248,511	3,776	334,673,362	3,776	915,511,427	11,328
4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kotak	-	-	-	-	-	-	395,983,500	13,290	435,581,850	13,290	479,140,035	#####	1,310,705,385	39,870
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	pcs	-	-	-	-	-	-	95,359,110	48,737	104,895,021	48,737	115,384,523	#####	315,638,654	146,211
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	exemplar	-	-	-	-	-	-	600,880,000	66,072	660,968,000	66,072	727,064,800	#####	1,988,912,800	198,216
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi	frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi	kali	-	-	-	-	-	-	-	0	25,000,000	12	27,500,000	12	30,250,000	12
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali	-	-	-	-	-	-	1,948,960,000	59	2,143,856,000	59	2,358,241,600	59	6,451,057,600	59
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip aktif dan arsip inaktif yang tersedia	Jumlah dokumen arsip aktif dan arsip inaktif yang tersedia	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	25,000,000	2	27,500,000	2	30,250,000	2

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi sistem informasi berbasis elektronik yang dibuat	Jumlah aplikasi sistem informasi berbasis elektronik yang dibuat	aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	0	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	2
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	-	-	-	-	-	-			605,000,000	100	665,500,000	100	732,050,000	100
		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		unit										10		10		20
		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		unit										10		10		20
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000,000	1	495,000,000	1	544,500,000	2
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	1	33,000,000	1	36,300,000	2
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	2
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	2
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/rumah dinas	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	3	33,000,000	3	36,300,000	3

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara/Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan	%	-	-	-	-	-	-	1,434,787,000	100	1,593,265,700	100	1,752,592,270	100	4,767,294,970	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		unit								109		118		118		119
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan		unit								109		118		118		119
4.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit pemeliharaan, jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit pemeliharaan, jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	612,210,000	6	673,431,000	6	740,774,100	6	2,026,415,100	6
4.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pemeliharaan, jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit pemeliharaan, jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	307,700,000	18	338,470,000	18	372,317,000	18	1,018,487,000	18
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan mebel yang disediakan	Jumlah unit pemeliharaan mebel yang disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	2
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	-	-	-	-	-	-	99,750,000	81	109,725,000	81	120,697,500	81	330,172,500	81

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan rumah dinas	Jumlah unit gedung pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan rumah dinas	unit	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	4	5,500,000	4	6,050,000	4
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan rumah dinas	Jumlah unit gedung pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan rumah dinas	unit	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	4	5,500,000	4	6,050,000	4
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan rumah dinas	Jumlah unit gedung pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan rumah dinas	unit	-	-	-	-	-	-	415,127,000	4	456,639,700	4	502,303,670	4	1,374,070,370	4
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan protokol dan Komunikasi Pimpinan/Jumlah Dokumen Pelaksanaan protokol dan Komunikasi Pimpinan yang disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	15,000,000	100	16,500,000	100	18,150,000	100
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan protokol dan Komunikasi Pimpinan yang tersedia		dokumen										3		3		3
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan protokol dan Komunikasi Pimpinan yang disediakan		dokumen										3		3		3
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Dokumen fasilitasi keprotokolan yang disediakan	Jumlah Dokumen fasilitasi keprotokolan yang disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Jumlah Dokumen fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD yang tersedia+Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan+Kebutuhan Rumah Tangga Unsur Pimpinan DPRD yang tersedia/Jumlah Dokumen Fasilitasi Fraksi DPRD yang disediakan+Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang direncanakan+Kebutuhan Rumah Tangga Unsur Pimpinan DPRD yang disediakan/3	%	-	-	-	-	-	-	2,044,476,700	100	2,253,924,370	100	2,479,316,807	100	6,773,267,877	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Fraksi DPRD yang tersedia		dokumen								0		1		1		1
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Fraksi DPRD yang disediakan		dokumen								0		1		1		1
		Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan		kali								50		50		50		50
		Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang direncanakan		kali								50		50		50		50
		Kebutuhan Rumah Tangga Unsur Pimpinan DPRD yang tersedia		ob								36		36		36		36
		Kebutuhan Rumah Tangga Unsur Pimpinan DPRD yang disediakan		ob								36		36		36		36
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Fraksi DPRD yang tersedia	Jumlah Dokumen Fasilitasi Fraksi DPRD yang tersedia	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang direncanakan	kali	-	-	-	-	-	-	544,476,700	50	598,924,370	50	658,816,807	50	1,802,217,877	50
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kebutuhan Rumah Tangga Unsur Pimpinan DPRD yang tersedia	Kebutuhan Rumah Tangga Unsur Pimpinan DPRD yang tersedia	ob	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000	36	1,650,000,000	36	1,815,000,000	36	4,965,000,000	36
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD+Persentase pembahasan kebijakan anggaran+Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan+Persentase peningkatan Kapasitas DPRD+Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat+Persentase Pelaksanaan dan pengawasan +Persentase Pembahasan Kerja sama daerah+Persentase Fasilitasi DPRD/8	%	-	-	-	-	-	-	21,261,104,260	92	23,588,214,686	100	25,947,036,155	100	70,617,465,101	100
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen pembentukan peraturan daerah yg disusun/jumlah pembentukan peraturan daerah yg dibutuhkan	%	-	-	-	-	-	-	1,568,587,900	50	1,735,446,690	100	1,908,991,359	100	5,204,125,949	100
		Jumlah dokumen pembentukan peraturan daerah yg tersusun		dokumen								2		4		4		4
		jumlah pembentukan peraturan daerah yg dibutuhkan		dokumen								4		4		4		4

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen Propemperda yang dihasilkan	Jumlah dokumen Propemperda yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Raperda yang dihasilkan	Jumlah dokumen Raperda yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,568,587,900	1	1,725,446,690	1	1,897,991,359	1	5,192,025,949	1
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun/Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang dibutuhkan	%	-	-	-	-	-	-	5,722,915,300	100	6,295,206,830	100	6,924,727,513	100	18,942,849,643	100
		Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun		dokumen								5		5		5		5
		Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang dibutuhkan		dokumen								5		5		5		5
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dihasilkan	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,432,823,900	1	1,576,106,290	1	1,733,716,919	1	4,742,647,109	1
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,443,322,400	1	1,587,654,640	1	1,746,420,104	1	4,777,397,144	1
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD induk yang disediakan	Jumlah dokumen APBD induk yang disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen Pembahasan APBD yang dihasilkan	Jumlah dokumen Pembahasan APBD yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,433,118,000	1	1,576,429,800	1	1,734,072,780	1	4,743,620,580	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dihasilkan	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,413,651,000	1	1,555,016,100	1	1,710,517,710	1	4,679,184,810	1
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun/Jumlah dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dibutuhkan	%	-	-	-	-	-	-	1,419,126,000	100	1,591,038,600	100	1,750,142,460	100	4,733,607,060	100
		Jumlah dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun		dokumen								1		7		7		7
		Jumlah dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dibutuhkan		dokumen								1		7		7		7
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah yang dihasilkan	jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,419,126,000	1	1,561,038,600	1	1,717,142,460	1	4,697,307,060	1
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan Kapasitas DPRD	Honorarium kelompok pakar dan tim ahli yang dibayarkan dan honorarium tenaga ahli fraksi yang dibayarkan+Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang dilaksanakan,Jumlah dokumen hubungan masyarakat yang diselenggarakan dan Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang dihasilkan/Honorarium kelompok pakar dan tim ahli yang disediakan dan honorarium tenaga ahli fraksi yang disediakan+Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang disediakan,Jumlah dokumen hubungan masyarakat yang disediakan dan Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang disusun/2	%	-	-	-	-	-	-	2,267,589,060	100	2,625,347,966	100	2,887,882,763	100	7,664,229,789	100
		Honorarium kelompok pakar dan tim ahli yang dibayarkan dan honorarium tenaga ahli fraksi yang dibayarkan		ob								0		96		96		96

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Honorarium kelompok pakar dan tim ahli yang disediakan dan honorarium tenaga ahli fraksi yang disediakan		ob								0		96		96		96
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang dilaksanakan,Jumlah dokumen hubungan masyarakat yang diselenggarakan dan Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang dihasilkan		dokumen								2		3		3		3
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang disediakan,Jumlah dokumen hubungan masyarakat yang disediakan dan Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang disusun		dokumen								2		3		3		3
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	563,600,000	1	619,960,000	1	681,956,000	1	1,865,516,000	1
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Honorarium kelompok pakar dan tim ahli yang dibayarkan	Honorarium kelompok pakar dan tim ahli yang dibayarkan	ob	-	-	-	-	-	-	-	0	120,000,000	24	132,000,000	24	145,200,000	24
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Honorarium tenaga ahli fraksi yang dibayarkan	Honorarium tenaga ahli fraksi yang dibayarkan	ob	-	-	-	-	-	-	-	0	6,000,000	72	6,600,000	72	7,260,000	72
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hubungan masyarakat yang diselenggarakan	Jumlah dokumen hubungan masyarakat yang diselenggarakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang dihasilkan	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,703,989,060	1	1,874,387,966	1	2,061,826,763	1	5,640,203,789	1
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Frekuensi kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan dan frekuensi reses yang dilaksanakan+Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang tersusun/Frekuensi kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan dan frekuensi reses yang direncanakan+Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disediakan/2	%	-	-	-	-	-	-	534,812,000	100	598,293,200	100	658,122,520	100	1,782,327,720	100
		Frekuensi kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan dan frekuensi reses yang dilaksanakan		kali								2		4		4		4
		Frekuensi kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan dan frekuensi reses yang direncanakan		kali								2		4		4		4
		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang tersusun		Dokumen								0		2		2		2
		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disediakan		Dokumen								0		2		2		2
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Frekuensi kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Frekuensi kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	kali	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	2	5,500,000	2	6,050,000	2
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	2	5,500,000	2	6,050,000	2
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	Frekuensi reses yang dilaksanakan	kali	-	-	-	-	-	-	534,812,000	2	588,293,200	2	647,122,520	2	1,770,227,720	2

[illegible]

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi DPRD	Frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang dilaksanakan+Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah yang tersedia dan jumlah dokumen fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang tersedia/Frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang direncanakan+Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah yang disediakan dan jumlah dokumen fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang disediakan/2	%	-	-	-	-	-	-	9,748,074,000	100	10,732,881,400	100	11,806,169,540	100	32,278,224,940	100
		Frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas		kali								50		50		50		50
		Frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang direncanakan		kali								50		50		50		50
		Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah yang tersedia dan jumlah dokumen fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang tersedia		Dokumen								0		2		2		2

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	Kondisi Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
					Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah yang disediakan dan jumlah dokumen fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang disediakan		Dokumen								0		2		2		2
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kali	-	-	-	-	-	-	9,748,074,000	50	10,722,881,400	50	11,795,169,540	50	32,266,124,940	50
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang tersedia	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang tersedia	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang tersedia	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang tersedia	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1
TOTAL					-	-	-	-	-		49,689,574,277	-	55,689,531,705	-	61,258,484,875	-	165,720,000,857	-

Pagar Alam, 2021
Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam

Rano Fahlesi, SE.,M.Si
NIP. 197707262003121008